



**Collaborative land use planning and sustainable institutional arrangements for strengthening land tenure, forest and community rights in Indonesia**



## **Laporan Lokakarya Prospektif**

Pontianak, 26 – 28 Mei 2011  
Pontianak, 23 – 25 Juni 2011  
Putussibau, 25 – 27 Juli 2011  
Lanjak, 24 – 25 November 2011  
Putussibau, 30 April 2012  
Putussibau, 11 November 2012

## Daftar Isi

|  |    |
|--|----|
| Latar Belakang .....   | 4  |
| Pengorganisasian kegiatan PPA.....   | 5  |
| Lokakarya Seri 1 .....   | 7  |
| Gambaran umum Metoda PPA .....   | 8  |
| 1. Identifikasi batasan sistem .....   | 8  |
| Latihan: Eksplorasi masa depan.....  | 9  |
| 2. Identifikasi variabel .....   | 10 |
| 3. Mendefinisikan variabel.....  | 12 |
| Kesepakatan tindak lanjut rencana PPA 2 .....  | 12 |
| Lokakarya Seri 2 .....   | 13 |
| Review Lokakarya Seri 1 .....  | 13 |
| 4. Analisis pengaruh timbal balik .....  | 13 |
| Hasil Analisis dan Interpretasi .....  | 15 |
| Kesepakatan rencana tindak lanjut PPA 3 .....  | 18 |
| Lokakarya Seri 3 .....   | 19 |
| Review lokakarya seri 2.....   | 19 |
| 5. Identifikasi dan memilih variabel kunci .....                                     | 19 |
| 6. Definisi keadaan variabel kunci.....  | 20 |
| 7. Membangun berbagai scenario .....   | 21 |
| Rencana tindak lanjut.....   | 26 |
| Konsultasi dengan Sekda Kapuas Hulu .....  | 26 |
| Konsultasi publik PPA dan pembuatan rencana aksi.....                                | 27 |
| Pelajaran yang bisa dipetik .....  | 30 |
| Lampiran .....   | 32 |
| 1. Daftar peserta.....   | 32 |
| 2. Daftar variabel dan definisi .....  | 34 |
| 3. Rangking variabel berdasarkan pengaruh (langsung, tidak langsung dan total)<br>38 |    |
| 4. Narasi lengkap Skenario .....   | 39 |
| 5. Matrik skenario terpilih hasil konsultasi public kecamatan .....                  | 43 |
| 6. Hasil pengembangan rencana aksi.....  | 45 |

## **Daftar Tabel**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1. Tahapan Lokakarya PPA .....  | 6  |
| Tabel 2. Variabel yang mempengaruhi PEMBANGUNAN Kapuas Hulu .....                                       | 11 |
| Tabel 3. Ranking kekuatan 20 variabel terkuat (langsung, tidak langsung dan total)<br>.....             | 15 |
| Tabel 4. Variabel dengan Skor tertinggi berdasarkan hasil analisis .....                                | 20 |
| Tabel 5. Keadaan variabel kunci .....   | 21 |
| Tabel 6. Kombinasi keadaan variabel yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan<br>(incompatible) ..... | 23 |

## **Daftar Kotak**

|   |   |
|---|---|
| Kotak 1. Harapan peserta lokakarya PPA..... | 7 |
| Kotak 2. Batasan Sistem .....               | 9 |

## **Daftar Gambar**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1. Grafik Peran Variabel (pengaruh langsung dan tidak langsung) ..... | 17 |
|--|----|

## Latar Belakang

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah mendapat amanat sebagai *agent of development* di daerah. Disisi lain, pembangunan memerlukan modal yang berbentuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya keuangan maupun modal lainnya.

Selain factor resources, perlu disadari bahwa pembangunan sebagai suatu sistem diwarnai oleh kompleksitas, dipengaruhi oleh berbagai factor pendorong (push factor) maupun penarik (pull factor), serta adanya ketidakpastian. Pemahaman secara utuh terhadap isu-isu kunci memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak yang memungkinkan mereka berbagi sumberdaya, pengetahuan, dan keahlian untuk memahami permasalahan yang rumit secara lebih tepat. Melalui proses kolaboratif, para pihak dapat menghasilkan pandangan yang konstruktif serta berorientasi 'Mencari jalan keluar' dari berbagai permasalahan dalam rangka mencapai visi bersama.

Pemahaman terhadap berbagai hal diatas akan membantu para pengambil kebijakan mengenali jenis analisis dan perencanaan pembangunan yang paling tepat, mempersiapkan diri menghadapi perubahan serta memiliki kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian yang menjadi penyebabnya.

Dalam konteks yang lebih spesifik, pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai dua sisi mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, posisi kabupaten Kapuas Hulu yang berperanan penting bagi keseimbangan ekosistem di Pulau Kalimantan dimana didalamnya terdapat dua buah kawasan konservasi penting yaitu Taman Nasional Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun.

Kedua, letak geografis kabupaten di wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Indonesia menjadikan ide pembangunan disegala bidang merupakan keinginan masyarakat maupun pengambil kebijakan di tingkat lokal.

Dengan melihat kondisi diatas, pertanyaan strategis yang kemudian muncul adalah sebagai berikut:

1. Apa yang mungkin terjadi dengan pembangunan di Kapuas Hulu 20 tahun yang akan datang?  
(*What could possibly happen with the development in Kapuas Hulu in 20 years in the future?*)
2. Pendekatan pembangunan seperti apa yang mungkin dan tepat bagi Kapuas Hulu dengan mempertimbangkan kebutuhan konservasi dan pembangunan?  
(*What development approach is possible and suitable for Kapuas Hulu District considering both conservation and development' needs?*)

Berdasarkan pandangan terhadap kondisi diatas, kegiatan Collaborative Land Use Planning Project (COLUPSIA) berinisiatif untuk mengadakan lokakarya para pihak untuk memfasilitasi sharing pengetahuan dan keahlian berkaitan dengan

pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu. Lokakarya ini penting untuk menjawab pertanyaan strategis diatas.

Melalui proses ini diharapkan para pihak menemukenali perubahan yang sedang dan mungkin terjadi di masa depan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, membangun kesepahaman mengenai gambaran visi untuk masa depan yang diinginkan, dan mempersiapkan langkah-langkah menghadapi perubahan yang mungkin, dan menentukan tindakan yang diperlukan saat ini yang mengarah kepada visi masa depan.

## **Pengorganisasian kegiatan PPA**

Metode PPA merupakan metode partisipatif dan multi pihak. Oleh karena itu pemilihan partisipan yang akan mengikuti kegiatan lokakarya merupakan tahapan awal yang penting. Proses pemilihan partisipan dimulai dengan konsultasi dengan beberapa informan kunci yang mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap isu-isu di Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam konsultasi tersebut beberapa kriteria partisipan PPA ditentukan yaitu:

- a. Memiliki keahlian yang relevan dengan topik yang dibicarakan
- b. Mempunyai ketersediaan waktu untuk mengikuti rangkaian lokakarya. Yang bersangkutan juga harus memperoleh ijin dari pimpinan/atasan ditempatnya bekerja.
- c. Berpikiran terbuka dan dapat menerima pendapat yang berbeda

Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan, calon peserta dihubungi dan dijelaskan mengenai alur proses lokakarya PPA, tujuan dan hasil yang diharapkan dari lokakarya ini. Mengingat pentingnya hasil kegiatan ini untuk kabupaten, para peserta diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam seluruh kegiatan lokakarya. Tahapan ini sekaligus mendapatkan masukan mengenai ketersediaan waktu calon peserta dan apabila tidak dapat menghadiri, mereka dapat merekomendasikan orang lain dengan kriteria dan keahlian yang serupa.

Metode PPA merekomendasikan agar lokakarya diikuti oleh 10 – 12 orang. Dalam konteks Kapuas Hulu, peserta yang diundang mencapai 20 orang yang meliputi keahlian di bidang kebijakan yang berkaitan dengan topik pembangunan termasuk beberapa praktisi yang relevan. Jumlah peserta diharapkan mewakili keragaman isu yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi geografis Kapuas Hulu yang cukup luas maka jumlah peserta yang terlibat ditambah (daftar peserta terlampir).

Lokakarya PPA seri I dilaksanakan pada tanggal 26–28 Mei 2011, dilanjutkan dengan lokakarya seri 2 yang dilaksanakan pada tanggal 23-25 Juni 2011 di Pontianak dan seri 3 pada tanggal 25-27 Juli 2011 di Putussibau.

| <b>Seri Lokakarya</b> | <b>Jumlah Undangan</b> | <b>Jumlah peserta hadir</b> |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1                     | 20                     | 17                          |
| 2                     | 20                     | 16                          |
| 3                     | 16                     | 13                          |

Metode PPA terdiri dari 8 tahapan yang akan dilaksanakan melalui beberapa seri lokakarya. Pengalaman pelaksanaan PPA di Pulau Yamdena Maluku Tenggara menunjukkan, pelaksanaan lokakarya selama 1 minggu penuh kurang efektif dalam proses brainstorming dan melelahkan bagi peserta yang mengikutinya. Oleh karena itu, pelaksanaan lokakarya berseri merupakan pilihan yang paling masuk akal untuk memfasilitasi proses brainstorming secara efektif dan intensif, serta dapat menghasilkan keluaran yang dapat diterima oleh semua pihak.

**Tabel 1. Tahapan Lokakarya PPA**

| <b>Tahapan</b>  | <b>Seri Lokakarya</b> |
|---|-----------------------|
| <p><b>1. Definition of the system's limits</b><br/>Mendefinisikan isu dimana pengetahuan akan dikumpulkan dan dianalisis. Isu tersebut merupakan sistem yang mempunyai karakteristik ruang dan waktu</p> <p><b>2. Identification of variables</b><br/>Menentukan variable yang berpengaruh terhadap sistem dari berbagai perspektif keahlian.</p> <p><b>3. Definition of key variables</b><br/>Mendiskusikan relevansi variable dan definisinya</p>           | Lokakarya I           |
| <p><b>4. Mutual influence analysis</b><br/>Para pihak melakukan analisis structural dan menyepakati pengaruh dan ketergantungan langsung antar variable</p> <p><b>5. Interpretation of influence/dependence links</b><br/>Hasil analisis akan diolah dengan software yang disediakan sehingga menghasilkan tabulasi dan grafik yang menggambarkan 4 jenis variable:<br/>"Pendorong/driver"; "Penopang/stake";<br/>"marjinal/marginal"; dan "hasil/output"</p> | Lokakarya 2           |
| <p><b>6. Definition of the states of variables</b><br/>Menggambarkan keadaan variable dimasa depan dimana antar keadaan variable saling kontras dan eksklusif satu dengan lainnya</p> <p><b>7. Building scenarios</b><br/>Membangun scenario berdasarkan kombinasi variable dengan berbagai keadaan. Scenario dibangun melalui brainstorming, pengelompokan maupun penggabungan variable</p>  | Lokakarya 3           |
| <p><b>8. Strategic implications and anticipated actions</b><br/>Mendeskripsikan scenario yang dipilih termasuk strategi untuk mewujudkan aksi</p>   | Lokakarya 4           |

*Pantun acara lokakarya*

*Mari memetik buah pepaya  
Untuk kita membuat rujak  
Acara kita lokakarya  
Tentunya peserta sangatlah bijak  
(H. Ade Ibrahim)*

## **Lokakarya Seri 1** (26–28 Mei 2011)

Pada hari pertama (18/07/2011), acara diawali dengan agenda setting dimana peserta diminta saling memperkenalkan diri untuk mencairkan suasana dan mendiskusikan tujuan dan harapan peserta menghadiri lokakarya PPA. Acara ini dipandu oleh fasilitator yang meminta peserta berjalan melingkar menemui peserta lain dengan menceritakan identitas masing-masing, sehingga diakhir sesi peserta akan memperkenalkan rekan peserta yang lainnya.

Kemudian fasilitator mengajak peserta menuliskan harapan dan tujuan dalam mengikuti lokakarya ini. Fasilitator juga mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif selama lokakarya berlangsung.

### **Kotak 1. Harapan peserta lokakarya PPA**

- ✓ Mengetahui proses dan metode PPA
- ✓ Mendapatkan persepsi yang sama dalam membangun Kapuas Hulu
- ✓ Ingin berbagi dan sharing tentang pembangunan di Kapuas Hulu
- ✓ Mendapatkan informasi dan masukan dari berbagai kelompok kepentingan di Kapuas Hulu untuk pembangunan Kapuas Hulu masa depan
- ✓ Pertemuan ini membuahkan hasil yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat Kapuas Hulu dan benar-benar terwujud
- ✓ Untuk mengetahui keadaan Kapuas Hulu dulu – sekarang – yang akan datang secara alamiah dan ilmiah
- ✓ Mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pembangunan Kapuas Hulu dalam 20 tahun ke depan
- ✓ 1 (satu) langkah nyata membangun Kapuas Hulu
- ✓ Terwujudnya pemerintahan yang profesional untuk Kapuas Hulu
- ✓ Mendesain pembangunan Kapuas Hulu sesuai dengan karakter budayanya agar pembangunan berjalan cepat dan pesat
- ✓ Pembangunan Kapuas Hulu agar lebih memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan agar dapat dinikmati oleh anak cucu
- ✓ Pariwisata Kapuas Hulu harapan
- ✓ Infrastruktur Kapuas Hulu harapan
- ✓ Perencanaan yang jelas untuk kabupaten Kapuas Hulu ke depan serta implementasinya

## **Gambaran umum Metoda PPA**

Fasilitator menjelaskan mengenai asal muasal metode PPA dan bagaimana metode ini diaplikasikan dalam konteks masalah, wilayah maupun skala negara yang berbeda. Termasuk penjelasan tahapan metode hingga membangun skenario. Fasilitator juga berbagi pengalaman penerapan mengorganisasi kegiatan PPA sebelumnya di Pulau Yamdena.

Secara umum, metode PPA membantu para pihak dalam menghadapi ketidakpastian dimasa yang akan datang. Pemahaman tersebut penting terutama bagi para pihak untuk menghadapi permasalahan yang akan muncul dengan cara mendorong ke arah perubahan yang diinginkan sekaligus cara-cara mengantisipasi masa depan yang tidak diinginkan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, hasil PPA seharusnya dilanjutkan dan diinternalisasikan dalam proses pengambilan keputusan di kabupaten.

### **1. Identifikasi batasan sistem**

Sebelum mengidentifikasi batasan sistem, peserta diajak memahami sistem, karakteristik dan perilaku elemen didalam sistem. Dengan pemahaman ini, peserta diharapkan akan lebih mudah memahami alur PPA mengingat metode PPA menggunakan pendekatan sistem sebagai intinya. Didalam sistem terdapat elemen atau komponen sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Keterhubungan antar variabel inilah yang dianalisis bersama menggunakan metode PPA sehingga membentuk suatu struktur sistem. Dari struktur tersebut akan muncul beberapa variabel yang mempunyai pengaruh paling kuat dan strategis dimasa yang akan datang. Skenario masa depan disusun berdasarkan identifikasi variabel terkuat didalam sistem.

Melalui pemahaman sistem, pengambil kebijakan akan terhindar dari masalah baru yang timbul akibat suatu kebijakan, pendekatan parsial dalam memandang persoalan, dan mengutamakan manfaat jangka pendek dibandingkan biaya jangka panjang.

Identifikasi batasan system penting untuk memfokuskan permasalahan dan diskusi selama proses. Batasan sistem yang diminta antara lain topik yang didiskusikan, batasan geografis dan periode waktunya.

Dalam konteks Kapuas Hulu, pembangunan menjadi cara untuk meningkatkan keuntungan masyarakat, pemda, maupun pengusaha. Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian pihak saja sementara yang lainnya merugi. Selain pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, infrastruktur dan akses pendidikan, pembangunan diharapkan tidak merusak lingkungan.



## Kotak 2. Batasan Sistem

Apa pertanyaan topiknya?

- ✓ Apa yang terjadi dengan PEMBANGUNAN?  
Pembangunan didefinisikan sebagai upaya meningkatkan kualitas berbagai sektor diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dsb.

Dimana batasan geografis?

- ✓ Batas administratif Kabupaten Kapuas Hulu

Kapan periode waktunya?

- ✓ 20 tahun (Tahun 2030)

Siapa yang terlibat?

- ✓ Masyarakat adat
- ✓ Tokoh adat
- ✓ Tokoh agama
- ✓ Pemuda/ mahasiswa
- ✓ Pemerintah pusat
- ✓ Pemerintah kabupaten (Bappeda, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, PU, pariwisata)
- ✓ Pemerintah provinsi
- ✓ Pengusaha (pertambangan, perikanan, perdagangan, perkebunan, pertanian, kehutanan)
- ✓ DPRD

“Apa yang terjadi dengan PEMBANGUNAN di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2030”

## Latihan: Eksplorasi masa depan



Salah satu yang menarik dari metode PPA adalah metode ini membahas mengenai masa depan, sesuatu yang ingin dicapai seseorang/kelompok dimasa yang akan datang. Gambaran mengenai masa depan sesungguhnya ada pada setiap orang, termasuk mengenai cita-cita atau mimpi mengenai Kapuas Hulu yang lebih baik.

Latihan ini bertujuan untuk menstimulasi peserta memikirkan tentang Kapuas Hulu yang



diimpikan dan menuangkannya dalam bentuk gambar. Menuangkan pikiran dalam bentuk gambar merupakan salah satu cara menyampaikan ide dan dipercaya lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan lisan atau tulisan saja (Lester, 2006)<sup>1</sup>.

Fasilitator membagi peserta dalam kelompok dan masing-masing kelompok mencari gambar-gambar yang mewakili visi yang dicita-citakan dan menempelkan pada kertas flipchart. Di akhir sesi setiap kelompok mempresentasikan gambaran masa depan kepada seluruh peserta untuk mendapatkan masukan.

Dalam waktu yang cukup singkat, 4 kelompok menghasilkan gambaran masa depan Kapuas Hulu. Setiap kelompok memberikan judul yang unik terhadap hasil kerjanya yaitu 1. Mekar; 2. Kapuas Hulu megapolitan berbasis lingkungan; 3. Ingin jadi bupati; dan 4. Pembangunan berdasarkan hak masyarakat.

Dari latihan ini dapat diketahui bagaimana masing-masing kelompok memandang masa depan, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan serta siapa yang terlibat.

Berdasarkan eksplorasi yang dilakukan masing-masing kelompok, ternyata peserta memahami masa depan seperti apa yang ingin dicapai, faktor-faktor pendorong dan penghambat serta siapa yang perlu dilibatkan. Peserta juga menyadari pentingnya keterlibatan orang lain karena satu orang tidak bisa mengubah dan menyelesaikan semua persoalan di Kapuas Hulu.

## **2. Identifikasi variabel**

Dalam metode PPA, identifikasi variable merupakan langkah awal yang menentukan. Variable yang dimaksud dalam metode ini adalah faktor atau elemen yang mempunyai pengaruh terhadap topik “Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2030”.

Kriteria penentuan variable ini antara lain:

- a. tidak berbentuk kalimat panjang  
contoh: kondisi jalan yang sulit dilewati ketika musim hujan, maka variabelnya adalah “akses transportasi”
- b. bukan kalimat negatif  
contoh: pupuk mahal, maka variabelnya adalah “harga pupuk”
- c. bukan ekspresi fisik  
contoh: uang, maka variabelnya adalah “akses modal”
- d. mencirikan keadaan yang berbeda dimasa yang akan datang  
contoh: “Konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan swasta”, maka variabelnya adalah “Hubungan antara masyarakat lokal dan perusahaan swasta” karena dapat menggambarkan beberapa keadaan seperti: Percaya; Tidak percaya; Konflik terbuka, tidak ada masalah.

---

<sup>1</sup> Paul Martin Lester (2006). Visual Communication: Images with Messages, 4<sup>th</sup> edition, Thomson Wadsworth, Belmont USA

Dinamika dalam identifikasi variabel terasa ketika peserta saling mengusulkan variabel dengan perspektif yang berbeda-beda. Pada tahap pertama, semua variabel dikumpulkan tanpa mengkritisi relevansinya.

Sedangkan tahap berikutnya merupakan eliminasi variabel yang relevan terutama kesesuaian dengan kriteria tipe variabel dan mengelompokkan variabel yang sejenis dalam satu variabel serta membuat variabel baru terhadap variabel yang berbeda. Hasil identifikasi variabel dapat dilihat dalam annex 2.

Adapun daftar variabel yang dihasilkan pada sesi ini berdasarkan kategori adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Variabel yang mempengaruhi PEMBANGUNAN Kapuas Hulu**

| <b>Aspek</b>                | <b>Variabel</b>                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Kebijakan                   | Kebijakan pembangunan              |
|                             | Kebijakan pemda                    |
|                             | Kebijakan investasi                |
| Pendidikan                  | Jumlah murid                       |
|                             | Tingkat pendidikan                 |
|                             | Sebaran guru                       |
|                             | Biaya pendidikan                   |
|                             | Fasilitas Pendidikan               |
|                             | Kompetensi lulusan                 |
| Perikanan                   | Ketersediaan ikan                  |
|                             | Banjir                             |
|                             | Debit air                          |
| Kesehatan                   | Tingkat kesehatan masyarakat       |
|                             | Akses Layanan Kesehatan            |
|                             | Sanitasi                           |
|                             | Kesehatan lingkungan               |
| Perekonomian                | Lapangan Kerja                     |
|                             | Pendapatan masyarakat              |
|                             | Akses Pasar                        |
|                             | Pendapatan Asli Daerah             |
|                             | Pemanfaatan hasil hutan bukan Kayu |
|                             | Akses modal                        |
| Profesionalisme pengusaha   |                                    |
| Infrastruktur dan teknologi | Infrastruktur jalan                |
|                             | Penggunaan Teknologi               |
|                             | Akses teknologi                    |
| Demografi                   | Jumlah penduduk                    |
|                             | Luas Wilayah                       |
|                             | Sebaran penduduk                   |
| Tata guna lahan             | Tata ruang                         |
|                             | Alokasi lahan untuk sawit          |
|                             | Pengelolaan lahan adat             |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Lingkungan               | Sedimentasi<br>Kebakaran hutan   |
| Pertanian                | Hama<br>Penggunaan pestisida<br>Sistem usaha tani  |
| Pertambangan dan energi  | Penggunaan merkuri<br>Cadangan tambang<br>Infrastruktur listrik  |
| Tata kelola (governance) | Koordinasi antar sektor<br>Kompetensi aparatur pemerintahan<br>Kompetensi anggota DPRD<br>Akses informasi<br>Partisipasi masyarakat<br>Penegakan hukum |
| Adat dan budaya          | Hukum adat<br>Kearifan lokal pengelolaan SDA<br>Pelestarian asset budaya   |
| Lainnya                  | Pola pikir<br>Toleransi antar agama<br>Dinamika politik  |

Sumber: Lokakarya PPA 1

### 3. Mendefinisikan variabel

Tahapan berikutnya yaitu peserta mendefinisikan variabel yang dibuat sebagai ruang lingkup pembicaraan dalam diskusi selanjutnya. Definisi ini penting agar dalam melakukan analisis keterhubungan masing-masing peserta mempunyai persepsi yang sama. Apabila peserta bekerja dengan definisi yang tidak sama maka konsensus akan sulit dicapai.

Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok dimana masing-masing kelompok diminta untuk mendiskusikan definisi variabel didalam kelompok dan hasil definisinya dibahas kembali dalam suatu rapat pleno.

Proses yang berjalan akhirnya relatif lebih singkat dan definisi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan karena melewati proses rapat pleno yang merupakan forum untuk mencapai kesepakatan bersama.

### Kesepakatan tindak lanjut rencana PPA 2

Lokakarya ditutup dengan kesepakatan peserta untuk hadir kembali pada lokakarya kedua yang akan diadakan tanggal 23-25 Juni 2011 di Pontianak. Fasilitator mengingatkan kembali komitmen seluruh peserta untuk hadir kembali tanpa diwakilkan oleh orang lain. Peserta juga mengusulkan agar dinas/instansi yang belum hadir dalam lokakarya ke-1 agar juga diundang dalam workshop berikutnya.

## **Lokakarya Seri 2**

(23-25 Juni 2011)

### **Review Lokakarya Seri 1**

Lokakarya seri 2 dihadiri oleh 16 orang. Pada lokakarya ini ada peserta yang tidak hadir dan ada tambahan peserta dari dinas yang pada workshop ke-1 belum diundang. Sebelum masuk ke materi inti, fasilitator meriview hasil workshop sebelumnya sekaligus mengingatkan peserta mengenai apa yang sudah dihasilkan.

Fasilitator mengusulkan untuk mempertajam definisi variable karena beberapa definisi masih belum jelas maksud dan artinya antara lain variable jumlah penduduk, hukum adat, fasilitas pendidikan, hama, banjir, luas wilayah, dan dinamika politik. Dalam diskusi yang berkembang, muncul variable baru yaitu kebijakan transmigrasi sebagai variable yang mempengaruhi dinamika pembangunan di Kapuas Hulu.

Workshop kedua ini memfokuskan pada analisis hubungan antar variabel. Pengalaman PPA sebelumnya menunjukkan sesi ini membutuhkan energi yang paling besar.

### **4. Analisis pengaruh timbal balik**

Fasilitator menjelaskan mengenai analisis hubungan, bagaimana melakukannya berdasarkan metode PPA. Peserta melakukan analisis berdasarkan pengaruh langsung antara satu variabel lainnya. Analisis pengaruh tidak langsung tidak menjadi perhatian karena sudah ada software PPA yang melakukan perhitungan pengaruh tidak langsungnya. Hasil dari analisis ini adalah pengaruh langsung dan ketergantungan langsung.

Untuk melakukan analisis menggunakan skor dimana skor 0 menggambarkan tidak ada pengaruh langsung dan 1 menggambarkan ada pengaruh langsung. Sistem ini lebih mudah mencapai kesepakatan dibandingkan dengan menggunakan skor 0,1,2,3. Pengalaman sebelumnya mencoba kedua sistem skor ini dan hasilnya tidak berbeda.

Variable yang akan dianalisis sebanyak 54 variabel yang akan menghasilkan  $54 \times 54 = 2.916$  hubungan antar variable. Karena proses ini mengharuskan analisis dilakukan secara kritis dan benar, fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok kecil agar waktu yang ada bisa digunakan secara optimal. Setiap kelompok difasilitasi oleh satu orang fasilitator. Pada akhir pembahasan dimasing-masing kelompok, hasilnya akan digabungkan menjadi satu kesatuan analisis dan dibahas kembali pada rapat pleno oleh seluruh peserta.

Pada akhir hari ke-1 (23 Juni 2011) peserta sudah menyelesaikan analisis di tiap kelompok, sehingga pembahasan setiap variable dimulai pada hari ke-2.

Proses analisis hubungan pada awalnya terasa sulit karena masih ada kebingungan dalam memahami antara pengaruh langsung dan tidak langsung.

Secara umum peserta berpandangan ada pengaruh satu variable terhadap variable lainnya, namun ketika diperdalam sebenarnya pengaruh yang dimaksud adalah hubungan variable secara tidak langsung atau tidak ada hubungan sama sekali. Terutama, apabila variable yang menyangkut bidang pekerjaannya maka cenderung dipertahankan walaupun peserta lain mulai memahami memang antar variable tersebut tidak saling mempengaruhi atau pengaruhnya tidak langsung. Disini peserta mempunyai pre-asumsi mengenai apa yang penting dan seharusnya penting terutama yang menyangkut bidang pekerjaan atau pengetahuannya.

Dalam kenyataannya penggunaan skor 0 dan 1 menyebabkan munculnya efek psikologis. Peserta terlihat tidak puas apabila variable yang menurutnya berpengaruh diberikan nilai 0 (nol), walaupun memang ketika dianalisis tidak ditemukan hubungan pengaruh. Mereka seakan-akan merasa bahwa pemberian nilai 0 (nol) pada variabel akan membuat variabel tersebut kurang penting dan tidak berarti. Sehingga peserta cenderung berupaya memberi nilai 1 (satu) dengan menyampaikan argumentasi yang sebenarnya justru menunjukkan pengaruh variabel tersebut tidak langsung bahkan tidak punya pengaruh sama sekali.

Mencermati hal ini fasilitator mengubah pendekatan dalam mengkomunikasikan sistem skor. Peserta diajak menyepakati bahwa pengaruh antar variable dianggap “kecil/lemah” maka diberikan nilai 0 (nol) sedangkan apabila pengaruhnya “besar/kuat” maka diberi nilai 1 (satu). Fasilitator juga menegaskan bahwa apabila tidak ada pengaruh antar variable maka diberi nilai 0 (nol). Dengan pendekatan seperti ini, peserta seakan-akan menghadapi 3 pilihan skor yaitu pengaruh kuat, lemah dan tidak ada pengaruh. Sistem ini secara psikologis diterima oleh peserta dan dalam proses analisis variable selanjutnya terlihat lebih efektif dan hasilnya dapat diterima semua pihak.

Dalam melakukan analisis bersama, peserta mulai terlibat dan bisa memahami bagaimana analisis pengaruh dilakukan. Ketika dihadapkan pada variabel yang dipengaruhi (dependen), maka beberapa peserta mulai bisa memilah bahwa analisisnya berkebalikan, bukan searah. Peserta juga bisa membedakan mana yang pengaruh searah, pengaruh timbal balik (saling mempengaruhi) dan pengaruh tidak langsung.

Proses yang terjadi memang terlihat lambat pada awalnya terutama ketika fasilitator berusaha membantu peserta melakukan analisis secara benar, dan penjelasannya perlu diulang berkali-kali. Tidak hanya berhenti pada satu variabel tetapi pada variabel lainnya juga demikian. Peserta juga terlihat berusaha memahami penjelasan fasilitator tetapi kadang-kadang lupa sehingga perlu diingatkan terus menerus.

Harus diakui bahwa dalam proses PPA bagian analisis ini yang paling krusial tidak hanya berkaitan dengan substansi permasalahan yang dibicarakan namun juga berkaitan dengan waktu yang dialokasikan untuk menghasilkan kesepakatan analisis. Dalam seri 2 lokakarya PPA ini, kegiatan analisis pengaruh menempati porsi hampir dua hari kegiatan. Walaupun memerlukan waktu yang agak sedikit panjang dan melelahkan, pada akhirnya semua peserta menyepakati hasil analisis.

## Hasil Analisis dan Interpretasi

Setelah menyelesaikan tahapan analisis, maka selanjutnya adalah menjelaskan hasil analisis dan implikasi hasilnya. Yang pertama dilakukan adalah menjelaskan rangking kekuatan variabel yaitu kekuatan langsung, tidak langsung dan total yang merupakan gabungan kekuatan langsung dan tidak langsung.

Untuk menjelaskan kekuatan variabel dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut. Pengaruh langsung yang terkuat dapat terlihat pada KEBPEMDA, GUNATEKNO, LUASW, ARIF, JMPEND, POLAPIKIR, PARTISIPASI, HKADAT, TRAMPIL dan BANJIR.

Tabel 3. Ranking kekuatan 20 variabel terkuat (langsung, tidak langsung dan total)

| Kekuatan langsung terbobot |             | Kekuatan tak langsung terbobot |             | Kekuatan total terbobot |             |      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------|
| 1                          | KEBPEMDA    | 4.84                           | ARIF        | 2.24                    | KEBPEMDA    | 2.47 |
| 2                          | GUNATEKNO   | 4.35                           | JMPEND      | 2.14                    | GUNATEKNO   | 2.46 |
| 3                          | LUASW       | 3.44                           | KOMDPRD     | 2.05                    | LUASW       | 2.27 |
| 4                          | POLAPIKIR   | 3.01                           | LUASW       | 1.98                    | ARIF        | 2.21 |
| 5                          | BANJIR      | 2.48                           | HKADAT      | 1.97                    | JMPEND      | 2.19 |
| 6                          | JMPEND      | 2.32                           | PARTISIPASI | 1.96                    | POLAPIKIR   | 2.18 |
| 7                          | TRAMPIL     | 2.25                           | GUNATEKNO   | 1.95                    | PARTISIPASI | 1.93 |
| 8                          | PENDIDIKAN  | 2.17                           | POLAPIKIR   | 1.94                    | HKADAT      | 1.91 |
| 9                          | ARIF        | 2.04                           | KEBPEMDA    | 1.83                    | TRAMPIL     | 1.85 |
| 10                         | KOORD       | 1.74                           | DISTPEND    | 1.78                    | BANJIR      | 1.85 |
| 11                         | PARTISIPASI | 1.74                           | TRAMPIL     | 1.76                    | PENDIDIKAN  | 1.77 |
| 12                         | KEBTRANS    | 1.74                           | PENDIDIKAN  | 1.67                    | KOMDPRD     | 1.75 |
| 13                         | HKADAT      | 1.63                           | BANJIR      | 1.66                    | DISTPEND    | 1.72 |
| 14                         | INFRAJALAN  | 1.51                           | KOORD       | 1.59                    | KOORD       | 1.63 |
| 15                         | DISTPEND    | 1.41                           | AKINFO      | 1.57                    | PROFUSAHA   | 1.47 |
| 16                         | PROFUSAHA   | 1.29                           | PROFUSAHA   | 1.50                    | AKINFO      | 1.46 |
| 17                         | ALOSAWIT    | 1.03                           | KEBAKARAN   | 1.45                    | KEBAKARAN   | 1.29 |
| 18                         | AKINFO      | 0.99                           | KOMAPEM     | 1.41                    | DEBIT       | 1.26 |
| 19                         | KEBINVES    | 0.98                           | AKTEKNO     | 1.41                    | KOMAPEM     | 1.25 |
| 20                         | DEBIT       | 0.86                           | TATARUANG   | 1.36                    | AKTEKNO     | 1.23 |

Sumber: Lokakarya PPA 2

KEBPEMDA memiliki kekuatan langsung yang paling kuat, namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara tidak langsung. Hal ini mengindikasikan kuatnya dominasi kebijakan pemda dalam mempengaruhi sistem PEMBANGUNAN di kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kata lain, jika kebijakan pemda tidak diarahkan kepada misalnya penyediaan infrastruktur, maka dapat dipastikan sector infrastruktur akan semakin tertinggal. Demikian pula sebaliknya.

GUNATEKNO berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan dan memanfaatkan teknologi. Hal ini menjadi perhatian para pihak karena teknologi

merupakan variable yang terus berkembang, terkadang jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan. Penggunaan teknologi menjadi variable yang penting karena teknologi mampu menyediakan solusi terhadap permasalahan manusia misalnya keterbatasan sumber daya alam, bahan bakar, kesehatan dan beragam aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap PEMBANGUNAN di Kapuas Hulu.

POLAPIKIR merupakan variable yang dibahas cukup intensif. Hasil analisis menunjukkan POLAPIKIR mempunyai pengaruh langsung cukup kuat sedangkan pengaruh tidak langsung yang lebih kecil. Jika dilihat lebih dalam pengaruh POLAPIKIR terhadap sistem PEMBANGUNAN muncul sebagai hasil dari pergulatan variable seperti pengalaman, pengetahuan, pendidikan dan informasi. Mengingat terbentuknya POLAPIKIR melalui proses yang panjang, maka karakteristik variabel ini lebih merupakan variabel hasil dari interaksi variabel lain.

BANJIR termasuk variabel yang mempengaruhi karena masyarakat Kapuas Hulu akhir tahun 2010 baru saja mengalami banjir besar siklus 10 tahunan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pemikiran peserta selama lokakarya. Namun jika dilihat lebih dalam kejadian banjir ini terjadi karena curah hujan yang cukup banyak pada bulan-bulan tersebut dimana para stakeholder tidak mempunyai kemampuan untuk merubah cuaca yang merupakan faktor alam. Dalam hal ini banjir seharusnya dimasukkan sebagai variabel eksternal.

ARIF yang merepresentasikan variabel kearifan lokal dalam pengelolaan SDA menempati variabel dengan kekuatan tidak langsung paling tinggi. Variabel ini mempunyai kedekatan dengan variabel HKADAT dan PARTISIPASI. Dalam sistem PEMBANGUNAN di Kapuas Hulu, kearifan lokal menjadi variabel penting yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam baik ditingkat lokal setempat maupun kabupaten. Bahkan kebijakan pemda perlu mempertimbangkan kearifan lokal setempat untuk menghindari penolakan maupun konflik.

Kearifan lokal tidak terlepas dari keberadaan hukum adat yang berlaku di masyarakat Kapuas Hulu. Walaupun terdiri dari berbagai suku yang hidup didalamnya, hukum adat yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat masih dipegang teguh. Inilah yang memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan SDA.

PARTISIPASI masyarakat merupakan elemen penting mengingat peran masyarakat menandakan adanya kepemilikan (*ownership*) disamping pengawasan mengenai sejauhmana pembangunan berjalan dan memberikan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh kemauan dan kebijakan pemerintah.

LUASW menggambarkan variabel jangkauan administrasi pemerintahan. Melihat realitas luas wilayah Kapuas Hulu yang cukup luas, dapat dipahami bagaimana variabel ini akan mempengaruhi PEMBANGUNAN yang selanjutnya berdampak kepada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

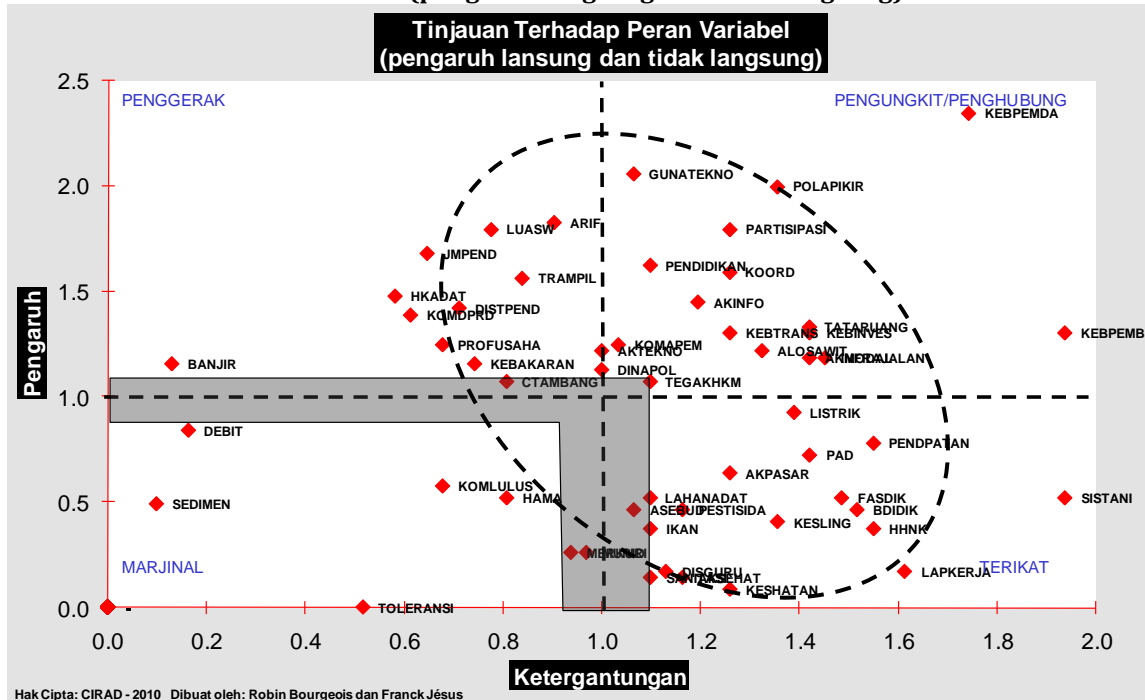
Salah satu aspek penting yang mempengaruhi pembangunan di Kapuas Hulu adalah keterampilan yang dihasilkan melalui pendidikan non formal dan pengalaman. Penguasaan keterampilan dan kewirausahaan saling berkaitan dimana akan membantu menciptakan peluang usaha baru. Pembangunan tidak hanya bertumpu pada sektor usaha formal namun tumbuhnya kewirausahaan akan menciptakan peluang-peluang baru yang dapat menyerap lapangan kerja.



Kedua, yaitu menjelaskan mengenai posisi variabel pada grafik seperti gambar berikut (Gambar 1). Peran variabel dapat dijelaskan melalui posisi variabel pada kuadran grafik yaitu:

- Kuadran I terletak disebelah kiri atas menggambarkan variabel penggerak yaitu variabel yang menggerakkan sistem. Mereka mempunyai pengaruh kuat dan ketergantungan terhadap variabel lain yang kecil.
- Kuadran II terletak disebelah kanan atas menggambarkan variabel yang berperan sebagai penghubung dan pengungkit. Variabel di kuadran ini selain mempunyai pengaruh kuat, ketergantungannya juga kuat.
- Kuadran III terletak di kanan bawah merupakan variabel terikat, yang secara alamiah variabelnya merupakan variabel hasil.
- Kuadran IV di kiri bawah merupakan kuadran variabel marjinal, artinya dalam sistem yang dibicarakan variabel marjinal tidak terlalu memegang peranan. Dan terakhir variabel yang terletak pada area abu-abu disebut *bunch variable* dimana peran variabel didalamnya tidak menentu (tidak jelas).

Gambar 1. Grafik Peran Variabel (pengaruh langsung dan tidak langsung)



Sumber: Lokakarya PPA 2

Jika melihat kekuatan total variabel pada Tabel 3 diatas, variabel yang mempunyai rangking tertinggi terletak pada kuadran penggerak dan pengungkit. Variabel kuat seperti KEBPEMDA, GUNATEKNO dan POLAPIKIR terletak pada wilayah pengungkit dimana mereka mempengaruhi kestabilan sistem karena secara alamiah mereka banyak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini semakin menyulitkan bagi variabel penggerak yaitu LUASW, ARIF dan JIMPEND

untuk mempengaruhi perubahan terkait PEMBANGUNAN di Kapuas Hulu. Karena bangunan sistem yang dihasilkan merupakan sistem yang tidak stabil (variabel berkumpul pada lingkaran putus-putus) maka untuk melakukan perubahan diperlukan pendekatan yang integratif disemua lini.

**Kesepakatan rencana tindak lanjut PPA 3**

Lokakarya ditutup dengan menyepakati pelaksanaan workshop ketiga di Putussibau, Kapuas Hulu pada tanggal 25-27 Juli 2011. Lokasi workshop merupakan keinginan para pihak mengingat topik bahasan adalah pembangunan Kapuas Hulu sehingga seri workshop terakhir sebaiknya diadakan di Kapuas Hulu.

## **Lokakarya Seri 3** (25-27 Juli 2011)

### **Review lokakarya seri 2**

Lokakarya seri 3 dibuka dengan mereview hasil analisis PPA 2. Pada tahapan analisis, yang menjadi perhatian hanya variabel internal. Fasilitator menunjukkan ada beberapa variabel yang seharusnya secara alami merupakan variabel eksternal. Variabel eksternal yaitu variabel yang berada diluar kendali para stakeholder, misalnya iklim merupakan hasil dari interaksi kondisi alam yang kompleks.

Variabel internal yang yang seharusnya menjadi variabel eksternal yaitu Jumlah Penduduk (JMPEND), BANJIR, SEDIMENTASI dan Debit air (DEBIT). Berikut ini alasan mengapa variabel tersebut dimasukkan sebagai variabel eksternal.

a. Jumlah Penduduk (JMPEND)

Menurut data bank dunia jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ini menunjukkan jumlah penduduk tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi yang bisa diintervensi oleh pengambil kebijakan adalah tingkat pertumbuhan penduduk. Dalam periode 1960 – 2008, laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,2% menjadi 1,2% pada tahun 2008.

b. BANJIR, SEDEMENTASi dan debit air (DEBIT)

Sedementasi dipengaruhi oleh struktur tanah, Debit dan Banjir dipengaruhi oleh jumlah air yang mengalir dan curah hujan. Faktor-faktor tersebut diluar dari kendali pengambil kebijakan.

Masuknya beberapa variabel internal menjadi variabel eksternal menyebabkan perubahan rangking variabel (lihat lampiran). Lokakarya PPA 3 menfokuskan pada pembuatan skenario berdasarkan variabel kunci yang dihasilkan dalam tahapan analisis.

### **5. Identifikasi dan memilih variabel kunci**

Fasilitator menjelaskan mengenai tahapan dalam pembuatan skenario yaitu

- a. Pemilihan variabel kunci
- b. Definisi keadaan variabel kunci
- c. Menentukan variabel yang incompatible
- d. Menyusun kombinasi skenario

Pemilihan variabel kunci diurutkan berdasarkan skor total yang terbesar. Hasil analisis terdiri dari kekuatan langsung, kekuatan tidak langsung dan kekuatan total. Kekuatan total merupakan penggabungan antara kekuatan variabel langsung dan tidak langsung. Adapun jumlah variabel kunci yang disarankan dengan mempertimbangkan kombinasi keadaan yang bisa dikelola dalam pembuatan skenario adalah 5-6 variabel kunci.

Dari hasil tersebut, variabel kunci dipilih dari variabel yang mempunyai kekuatan total paling tinggi dan penggabungan beberapa variabel yang berdekatan antara lain HKADAT dapat digabungkan dengan ARIF, dan TRAMPIL dan PENDIDIKAN. Berdasarkan kriteria tersebut variabel kunci yang disepakati sebanyak 6 variabel yaitu KEBPEMDA, GUNATEKNO, ARIF+HKADAT, POLAPIKIR, PARTISIPASI, dan TRAMPIL+PENDIDIKAN.

**Tabel 4. Variabel dengan Skor tertinggi berdasarkan hasil analisis**

| Variabel      | Skor Kekuatan langsung | Variabel    | Skor Kekuatan tidak langsung | Variabel    | Skor Kekuatan total |
|---------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 1 KEBPEMDA    | 5.396542               | ARIF        | 2.366772                     | KEBPEMDA    | 2.647688            |
| 2 GUNATEKNO   | 4.750754               | KOMDPRD     | 2.212034                     | GUNATEKNO   | 2.637504            |
| 3 POLAPIKIR   | 3.285483               | GUNATEKNO   | 2.09128                      | ARIF        | 2.353505            |
| 4 TRAMPIL     | 2.456586               | PARTISIPASI | 2.066407                     | POLAPIKIR   | 2.263956            |
| 5 PENDIDIKAN  | 2.375377               | HKADAT      | 2.050871                     | PARTISIPASI | 2.068545            |
| 6 ARIF        | 2.230215               | POLAPIKIR   | 1.988917                     | HKADAT      | 2.011721            |
| 7 PARTISIPASI | 2.000317               | KEBPEMDA    | 1.940407                     | TRAMPIL     | 1.969867            |
| 8 KOORD       | 1.900302               | TRAMPIL     | 1.856554                     | PENDIDIKAN  | 1.923682            |
| 9 KEBTRANS    | 1.878566               | DISTPEND    | 1.828128                     | KOMDPRD     | 1.891671            |
| 10 HKADAT     | 1.781533               | PENDIDIKAN  | 1.807014                     | DISTPEND    | 1.808215            |

## 6. Definisi keadaan variabel kunci

Fasilitator menjelaskan bahwa keadaan variabel menggambarkan berbagai keadaan positif maupun negatif. Aturan dalam membuat keadaan ini adalah keadaan tersebut masuk akal dan antara satu keadaan dengan keadaan lain dalam satu variabel harus berbeda dan kontras satu dengan lain.

Untuk memfasilitasi tahapan ini, fasilitator menstimulan peserta dengan pertanyaan sebagai berikut untuk masing-masing variabel kunci:

1. Keadaan apa yang paling diharapkan terjadi?
2. Keadaan apa yang paling ditakutkan terjadi?
3. Keadaan apa yang mungkin terjadi?
4. Keadaan luar biasa apa yang mungkin terjadi?

Setelah itu, peserta diberi kesempatan menuliskan keadaan dari masing-masing variabel dan selanjutnya fasilitator memandu mengelompokkan pendapat-pendapat tersebut. Pendapat yang sama dikelompokkan dan mengklarifikasi kepada peserta apabila penulisan atau maknanya kurang jelas. Hasil definisi keadaan variabel tersebut selanjutnya menjadi bahan dasar penyusunan skenario.

**Tabel 5. Keadaan variabel kunci**

| No | Variabel Kunci                | A   | B   | C  | D   |
|----|-------------------------------|---|---|--|---|
| 1  | KEBIJAKAN PEMDA               | Kebijakan yang disusun bersama dan berpihak pada rakyat                         | Kebijakan yang berpihak pada kelompok dan kepentingan tertentu  |  |   |
| 2  | GUNATEKNO                     | penguasaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan pada semua sektor          | masyarakat tidak memiliki dan menguasai teknologi (ketergantungan teknologi   | Penggunaan teknologi yang merusak lingkungan   |   |
| 3  | HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL | sinergi antara hukum adat dan hukum nasional                                    | kearifan lokal dan hukum adat diakui, dan dipelihara untuk kepentingan pencitraan                                     | Lenyapnya hukum adat dan hukum nasional lebih diakui kekuatannya                           |   |
| 4  | POLAPIKIR                     | pola pikir pembangunan berwawasan lingkungan                                    | pola pikir mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dalam penggunaan lahan diantaranya komersialisasi hukum adat | tidak memikirkan perlunya tata guna lahan  |   |
| 5  | PARTISIPASI                   | masyarakat berpartisipasi dari proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan | proses pembangunan tidak melibatkan masyarakat  | masyarakat menolak partisipasi   | masyarakat berpartisipasi apabila mendapat manfaat langsung |
| 6  | PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN   | akses pendidikan dan keterampilan mudah di semua jenjang                        | kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan  | Akses pendidikan dan ketrampilan sulit disemua jenjang dan berpihak pada kelompok tertentu |   |

## 7. Membangun berbagai skenario

Dalam tahapan membangun skenario ini, peserta diberikan pemahaman awal mengenai apa itu skenario masa depan dan contoh-contoh skenario masa depan yang sudah pernah dibuat baik di Indonesia maupun mancanegara.

Skenario masa depan bukanlah metode baru dan merupakan alat bantu untuk membuat suatu perencanaan masa depan. Pembuatan skenario harus melibatkan banyak stakeholder dan diketahui oleh publik secara luas agar

terbangun visi bersama melalui skenario tersebut. Dengan adanya visi bersama diharapkan akan mendorong adanya satu perubahan yang nyata. Berikut ini contoh skenario yang sudah pernah dibuat dalam konteks negara maupun isu tertentu.

➤ **Skenario Indonesia 2010**

1. Skenario Ujung Tanduk : Pemerintahan otoriter dengan kebijakan pro pertumbuhan
2. Skenario Masuk Rahang Buaya : Pemerintahan otoriter dengan orientasi kebijakan pro pemerintahan
3. Skenario Megayuh Biduk Retak : memadukan varian system pemerintah demokrasi dengan orientasi kebijakan ekonomi pro pertumbuhan.
4. Skenario Lambat tapi Selamat : memadukan varian sistem pemerintah demokrasi dengan orientasi kebijakan pro pemerataan.

➤ **Skenario China 2025**

1. Hubungan Regional
2. Janji yang belum terpenuhi
3. Jalan Sutra *Baru*

Pembuatan skenario dilakukan dengan mengkombinasikan keadaan dari setiap variabel kunci diatas (Tabel 5). Berdasarkan tabel tersebut, skenario yang mungkin dihasilkan adalah sejumlah  $2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 4 \times 3 = 216$  kombinasi. Untuk menghindari kompleksitas dari kombinasi skenario, terlebih dahulu dilakukan eliminasi variabel kunci yang incompatible dengan mengkombinasikan keadaan variabel kunci yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan (Tabel 6).

**Tabel 6. Kombinasi keadaan variabel yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan (incompatible)**

| No | Variabel Kunci                | A   | B   | C   | D   |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1  | KEBIJAKAN PEMDA               | Kebijakan yang disusun bersama dan berpihak pada rakyat                         | Kebijakan yang berpihak pada kelompok dan kepentingan tertentu  |   |   |
| 2  | GUNATEKNO                     | penguasaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan pada semua sektor          | masyarakat tidak memiliki dan menguasai teknologi (ketergantungan teknologi)  | Penggunaan teknologi yang merusak lingkungan  |   |
| 3  | HUKUM ADAT DAN KEARIFAN LOKAL | sinergi antara hukum adat dan hukum nasional                                    | kearifan lokal dan hukum adat diakui, dan dipelihara untuk kepentingan pencitraan                                     | Lenyapnya hukum adat dan hukum nasional lebih diakui kekuatannya                            |   |
| 4  | POLAPIKIR                     | pola pikir pembangunan berwawasan lingkungan                                    | pola pikir mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dalam penggunaan lahan diantaranya komersialisasi hukum adat | tidak memikirkan perlunya tata guna lahan   |   |
| 5  | PARTISIPASI                   | masyarakat berpartisipasi dari proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan | proses pembangunan tidak melibatkan masyarakat  | masyarakat menolak partisipasi  | masyarakat berpartisipasi apabila mendapat manfaat langsung |
| 6  | PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN   | akses pendidikan dan keterampilan mudah di semua jenjang                        | kurangnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan  | Akses pendidikan dan ketrampilan sulit di semua jenjang dan berpihak pada kelompok tertentu |   |

Fasilitator menjelaskan terlebih dahulu cara mengkombinasikan keadaan variabel, yaitu satu skenario terdiri dari kombinasi keadaan dari masing-masing variabel kunci dimana satu keadaan mewakili satu variabel kunci.

Kemudian untuk masing-masing skenario, fasilitator mengajukan pertanyaan untuk menstimulus peserta:

1. Skenario apa yang paling diharapkan/diinginkan terjadi?
2. Skenario apa yang paling ditakutkan terjadi?
3. Skenario apa yang mungkin terjadi (diluar skenario diatas)?, dan

4. Skenario luar biasa apa yang mungkin terjadi?

Selanjutnya, skenario tersebut dikelompokkan dengan melihat konten dari setiap pendapat. Setelah pengelompokan skenario, peserta diminta melihat kembali skenario yang dihasilkan dan menyepakati empat buah skenario yaitu

| Variabel kunci | Skenario |   |   |   |
|----------------|----------|---|---|---|
|                | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1              | A        | B | B | B |
| 2              | A        | B | C | B |
| 3              | A        | B | C | C |
| 4              | A        | B | C | B |
| 5              | A        | A | D | B |
| 6              | A        | B | B | C |

Tahapan berikutnya adalah menuliskan narasi skenario yang sudah disepakati. Fasilitator kemudian membagi peserta menjadi 4 kelompok dimana masing-masing kelompok membuat narasi skenario dalam bentuk rangkaian cerita. Cerita tersebut sebaiknya memenuhi unsur logika dan mengalir sehingga mudah dipahami oleh orang lain terutama publik yang tidak mengikuti lokakarya secara langsung. Kelompok juga diminta untuk memberi judul skenario yang menjiwai keseluruhan narasi didalam skenario tersebut.

Adapun judul dan narasi skenario yang dihasilkan adalah sebagai berikut

| Judul Skenario   | Variabel Penyusun Skenario   | Narasi Singkat   |
|------------------|--|--|
| Langkah Serampak | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A</li> <li>2. A</li> <li>3. A</li> <li>4. A</li> <li>5. A</li> <li>6. A</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang berpihak dan disusun bersama-sama dengan masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan.</li> <li>• Kemudahan akses pendidikan dan keterampilan akan membuka peluang meningkatkannya wawasan dan pola pikir masyarakat untuk menguasai teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.</li> <li>• hukum adat dan hukum positif bersinergi yang</li> </ul> |



|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              |  | mendukung jalannya pembangunan   |
| Lempar koin sembunyi tangan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B</li> <li>2. C</li> <li>3. C</li> <li>4. C</li> <li>5. D</li> <li>6. B</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skenario ini menggambarkan sikap dan pola pikir mementingkan kelompok tertentu menguasai pengambil kebijakan sehingga mayoritas kebijakan selalu berpihak terhadap pihak dan kelompok tertentu.</li> <li>• Sektor pendidikan kurang mendapat perhatian yang menjadi kebutuhan dasar semua lapisan masyarakat. Hal ini berakibat pada rendahnya kemampuan penguasaan teknologi, dan penguasaan teknologi menyebabkan kerusakan lingkungan.</li> <li>• Hukum positif semakin diterima ketika para pihak menganggap hukum adat sudah usang dan tradisional. Keberadaan masyarakat adat menjadi semakin marginal dan hilang</li> <li>• Masyarakat semakin oportunistis dimana partisipasi dalam pembangunan hanya semu karena mengharapkan imbalan belaka</li> <li>• Parahnya, tidak ada pihak yang peduli pentingnya perencanaan tata guna lahan. Alih-alih mensejahterakan masyarakat, biaya dari lingkungan yang rusak semakin menggerus pendapatan daerah.</li> </ul> |
| Mendulang Emas mendapat Batu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B</li> <li>2. B</li> <li>3. C</li> <li>4. B</li> <li>5. B</li> <li>6. C</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses pendidikan dan keterampilan sulit dan hanya dinikmati oleh kelompok dan golongan tertentu. Akibatnya masyarakat semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap teknologi.</li> <li>• Masyarakat adat terpecah belah sebagai akibat melemahnya hukum adat dan kearifan lokal yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan.</li> <li>• Berkembang pula pola pikir yang mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok dalam penggunaan lahan.</li> <li>• Pertentangan di masyarakat semakin tinggi yang dipicu oleh tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan. Kemiskinan dan ketimpangan akibat ketidakmerataan pembangunan mendorong apatisisme publik termasuk dalam pembangunan</li> </ul>   |
| Makan "Tuba Buah"            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B</li> <li>2. B</li> <li>3. B</li> <li>4. B</li> <li>5. A</li> <li>6. B</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggambarkan perilaku oportunistis dan kecenderungan mementingkan kepentingan kelompok dan pribadi terutama dalam perumusan kebijakan dan tata guna lahan.</li> <li>• Kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan menyebabkan rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Parahnya, masyarakat hanya menjadi konsumen teknologi dan semakin ketergantungan.</li> <li>• Masyarakat adat dan hukum adat diakui namun keberadaannya hanya sebagai pencitraan</li> </ul>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>kabupaten. Demikian pula partisipasi masyarakat cukup meluas dalam proyek yang didanai oleh donor namun kurang terlihat dalam proyek pembangunan dari pemerintah daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi melambat seiring semakin seringnya perubahan kebijakan pembangunan karena kuatnya pengaruh kelompok/ golongan tertentu</li> </ul> |
|--|--|---|

### **Pantun Penutupan PPA**

*Oleh Haji Ade Ibrahim*

Asam payak buah berbau  
 Buat memasak si sayur ikan  
 Acara lokakarya di Putussibau  
 Tahun dua ribu tiga puluh menjadi kenyataan

### **Rencana tindak lanjut**

Proses PPA tidak berhenti sampai menghasilkan skenario. Skenario yang dihasilkan perlu diketahui oleh pihak-pihak lain selain para ahli yang terlibat dalam lokakarya prospektif. Pada tahapan awal, scenario dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu. Pertemuan ini memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mensinergikan hasil scenario kedalam revisi RPJMD Kapuas Hulu.

Tindak lanjut lainnya yaitu mengkomunikasikan hasil lokakarya PPA kepada para pihak yang lebih luas untuk menyepakati scenario yang diinginkan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai scenario yang diinginkan tersebut. Dua konsultasi public dilakukan ditingkat kecamatan dan kabupaten diteruskan dengan lokakarya pengembangan rencana aksi untuk mencapai scenario terpilih.

### **Konsultasi dengan Sekda Kapuas Hulu**

Pertemuan dengan Sekda Kapuas Hulu dihadiri oleh 4 perwakilan peserta lokakarya PPA. Tujuan pertemuan ini untuk melaporkan mengenai kegiatan PPA yang sudah dilakukan, menyampaikan hasil kepada Sekda sekaligus untuk mendapatkan masukan mengenai tindak lanjut.

Fasilitator menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang kegiatan, proses yang sudah dicapai dan hasil skenario sekaligus menyampaikan harapan agar hasil kegiatan PPA bisa menjadi masukan dalam kebijakan pemda.

Menanggapi penjelasan tersebut, Sekda menyambut baik adanya inisiatif yang dilakukan proyek CoLUPSIA terkait dengan skenario mengenai masa depan pembangunan Kapuas Hulu tahun 2030. Menurutnya saat ini Pemda tetap berkomitmen dengan kabupaten konservasi dengan fokus ekoturisme. Pada saat yang sama, Pemda juga sedang menyusun revisi RPJMD (rencana pembangunan

jangka menengah daerah) sehingga Pemda menyambut baik apabila tim yang sudah ada bisa bersinergi untuk memberi masukan kedalam revisi RPJMD. Selain itu, hasil PPA ini bisa menjadi masukan dalam salah satu program Pemda mengenai sistem inovasi daerah (SID).

Di akhir pertemuan, Sekda meminta agar kegiatan seperti ini tetap dikomunikasikan dan diberitahukan lebih awal agar bisa disesuaikan dengan jadwal pemerintah daerah.

### **Konsultasi publik PPA dan pembuatan rencana aksi**

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya prospektif “Kapuas Hulu 2030”, hasil skenario perlu diinformasikan kepada masyarakat luas untuk mendapat masukan dari mereka. Hal ini dilakukan agar skenario dan hasil PPA juga dipahami oleh masyarakat luas dimana mereka tidak menjadi peserta lokakarya prospektif. Selain itu, untuk mengidentifikasi pertimbangan penting lainnya yang belum tercantum dalam skenario dan mengembangkan rencana aksi yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan.

Kegiatan konsultasi publik ini dilakukan sebanyak dua kali dengan mempertimbangkan cakupan dan anggaran yang tersedia. Konsultasi publik pertama dilakukan pada tingkat kecamatan dimana pesertanya berasal dari perwakilan desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan konsultasi publik kedua dilakukan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu level kabupaten yang akan dihadiri oleh para pihak dan pengambil kebijakan ditingkat kabupaten. Dengan demikian, hasil konsultasi publik ditingkat kecamatan akan memperkaya dan menjadi bahan di konsultasi tingkat kabupaten sehingga secara keseluruhan masukan dari kedua konsultasi public ini bisa mempertajak usulan rencana tindak dari skenario.

#### **a. Konsultasi public kecamatan**

Pada tahap pertama, konsultasi publik dilaksanakan tanggal 24-25 November 2011 bertempat di Lanjak sebagai ibukota kecamatan Batang Lupar. Acara ini mengundang perwakilan desa terutama desa-desa yang selama ini terlibat dalam kegiatan proyek CoLUPSIA baik itu kegiatan survey sosial ekonomi maupun survey ekologi. Kegiatan ini dilaksanakan pertama dilakukan sejalan dengan momen pelaksanaan festival Danau Sentarum di Lanjak dengan harapan animo partisipan yang hadir lebih tinggi.

Konsultasi publik pada hari pertama dibuka oleh fasilitator yang memandu peserta untuk menggambarkan kehidupan mereka 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam kegiatan ini peserta menggambarkan berbagai hal antara lain harapan tentang masa depan pendidikan anak, mata pencarian: kebun karet dan gaharu yang menghasilkan, sumber daya kayu, kemajuan akibat adanya kebun kelapa sawit, pengelolaan kolam ikan dan masa depan pembangunan seperti pembukaan perbatasan, pemekaran kabupaten, infrastruktur listrik dan telekomunikasi dan PLTMH.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan narasumber mengenai proses PPA bersama stakeholders dan hasil-hasil kegiatan PPA berupa skenario masa depan

Kapuas Hulu tahun 2030. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan penggunaan pendekatan skenario dan bagaimana tahapan proses PPA bisa menghasilkan berbagai kombinasi skenario. Ada empat skenario yang dihasilkan oleh stakeholder yaitu skenario Langkah Serampak, Lempar Batu Sembunyi Tangan, Mendulang Emas mendapat Batu dan Makan Tuba Buah.

Tanggapan peserta cukup beragam diantaranya menanyakan bagaimana proses terbentuknya skenario, tahapan apa yang sudah dilalui. Berkaitan dengan isi skenario, ada usulan untuk mengubah istilah didalam skenario yaitu 'hukum positif' menjadi 'hukum nasional' agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu terdapat masukan agar membuat skenario mikro yang merupakan turunan dari skenario PPA dimana skenario mikro secara praktis bermanfaat ditingkat bawah khususnya desa sebagai alat negosiasi terhadap rencana pembangunan dari pemerintah daerah.

Diskusi lain yang cukup menarik yakni mengenai peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Kapuas Hulu. Peserta sepakat bahwa hukum adat berlaku di daerah setempat sesuai dengan karakteristik, dirumuskan dan diputuskan sebagai acuan untuk pelanggaran asusila dan kesopanan sehingga siapa saja yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi yang terukur dilihat dari bobot pelanggarannya dan yang menyangkut pidana harus diselesaikan oleh penegak hukum/kepolisian. Namun demikian, perlu dicari sinkronisasi antara hukum adat dan hukum nasional karena keduanya hidup di masyarakat. Dan diatas itu semua peserta menganggap penting keadilan dalam hukum, terlepas apakah itu hukum adat atau hukum nasional.

Terkait dengan pengelolaan lahan, beberapa peserta menyampaikan kondisi terkait dengan pembukaan kebun kelapa sawit, terjadi penurunan kualitas air akibat maraknya ekspansi kelapa sawit.

Pada hari kedua, konsultasi public dilanjutkan dengan diskusi kelompok dimana setiap kelompok mendiskusikan 2 skenario terpilih yaitu skenario yang diinginkan terjadi dan skenario yang ditakutkan terjadi. Untuk kedua skenario tersebut, peserta mendiskusikan usulan tindakan untuk mendorong dampak positif dan mengurangi dampak negative jika skenario tersebut terjadi. Dari 4 kelompok, mereka memilih skenario 1 (langkah serampak) dan skenario 4 (makan tuba buah) untuk didiskusikan. Dari hasil diskusi, kedua kelompok mengusulkan tindakan untuk mencapai skenario 1 dan menghindari skenario 4 adalah dengan bekerja sama antar para pihak baik dalam bentuk komunikasi maupun koordinasi. Selama ini terjadi lemahnya komunikasi para pihak misalnya keberadaan masyarakat adat dan hukum adat tidak mendapat perhatian dari para pihak terkait. Matrik skenario terpilih secara lengkap bisa dilihat dalam lampiran 5.

#### b. Konsultasi public kabupaten

Pertemuan konsultasi publik PPA tingkat kabupaten dilaksanakan di Putussibau tanggal 30 April 2012 merupakan kelanjutan dari lokakarya PPA dan konsultasi public sebelumnya. Pertemuan ini dihadiri oleh sekitar 35 peserta yang berasal dari perwakilan kecamatan, instansi/dinas kabupaten antara lain Dinas

Pendidikan, BAPPEDA, Perikanan, Pariwisata, Pekerjaan Umum, Taman Nasional, masyarakat lokal dan perwakilan DPRD.

Konsultasi publik dibuka oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Kapuas Hulu yang menekankan fakta bahwa di Kapuas Hulu terdapat dua taman nasional yang menempati luasan sekitar 51 % (termasuk kawasan lindung) sehingga wilayah yang dapat dibangun menjadi terbatas. Pada saat yang sama Kapuas Hulu diposisikan sebagai beranda depan Indonesia karena letaknya di wilayah perbatasan, tetapi kurangnya akses infrastruktur seperti transportasi, kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini mempengaruhi lemahnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang berada di peringkat kedelapan se-provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten saat ini mengarahkan fokus pembangunan pada ekowisata dalam rangka mengoptimalkan potensi keindahan bentang alam dan lansekap yang selaras dengan konservasi. Namun demikian, sector pariwisata masih lemah sehingga diperlukan kolaborasi diantara para pihak.

Presentasi dari proyek CoLUPSIA menyampaikan kemajuan kegiatan selama ini dan secara khusus mempresentasikan hasil skenario dari PPA lokakarya. Setelah presentasi tersebut dilakukan diskusi kelompok untuk membahas 4 skenario dan memilih skenario 'paling' diinginkan terjadi dimasa depan. Dalam diskusi kelompok, peserta juga membahas langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan skenario terpilih.

Hampir seluruh peserta lokakarya konsultasi public memilih Skenario 1 Langkah Serampak sebagai gambaran masa depan yang diinginkan. Terdapat pula peserta yang pesimis bahwa skenario 1 mungkin terjadi dimasa depan, namun melihat kemungkinan skenario 1 terjadi pada skala lokal dan mikro seperti dusun, RT / RW atau kelurahan. Terkait dengan skenario lainnya (Skenario 2,3,4), mayoritas peserta berpendapat bahwa gambaran dari skenario tersebut telah terjadi misalnya sulitnya akses air di daerah dekat perkebunan (kasus Silat Hulu) sehingga sebagian besar penduduk harus membeli air bersih untuk keperluan rumah tangga

Sebagai tindak lanjut, para pihak perlu memikirkan monitoring setelah kegiatan CoLUPSIA berakhir. Peserta menyadari dalam prakteknya antara rencana pembangunan dan implementasinya seringkali berbeda karena berbagai sebab dan factor seperti situasi politik lokal, kepemimpinan dan lemahnya komitmen para pihak. Oleh karena itu peran Bappeda dan Bawasda memegang peran penting didalam monitoring. Integrasi hasil PPA kedalam kebijakan kabupaten (melalui APBD, seminar publik dll) merupakan kunci agar proses yang sudah ada memberi manfaat kepada pemerintah daerah.

Para peserta menyadari bahwa skenario adalah pendekatan makro untuk agenda pembangunan dan perlu pendekatan mikro untuk menjawab permasalahan yang lebih detail dan spesifik ditingkat lokal. Ide-ide seperti pengembangan komoditas yang sesuai dengan kondisi Kapuas Hulu, perencanaan untuk ekowisata dan penggunaan air sebagai tenaga listrik merupakan potensi yang bisa dikembangkan.

Secara umum peserta sepakat diperlukan rancang ulang peruntukan lahan sebagai upaya menghindari konflik yang berlanjut dimasa depan. Disadari bahwa

selama ini biaya social dari pembangunan kurang diperhitungkan sehingga apabila terjadi kerusakan lingkungan, justru dibayar oleh anggaran kabupaten yang artinya public ikut menanggung. Terjadi debat diantara peserta mengenai sisi positif investasi kelapa sawit untuk pembangunan daerah seperti infrastruktur jalan dll dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

c. Lokakarya pembuatan rencana aksi

Sebagai kelanjutan dua lokakarya sebelumnya, diadakan lokakarya kemajuan yang secara khusus bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam rencana aksi untuk mencapai skenario terpilih, sekaligus memaparkan hasil kajian dan kegiatan yang telah dicapai Proyek CoLUPSIA kepada para pihak selama 3 tahun berkegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Aula Bappeda Kapuas Hulu dan dihadiri oleh 75 peserta yang berasal dari perwakilan kecamatan, desa, dinas dan instansi kabupaten serta NGO yang beraktivitas di Kapuas Hulu.

Peserta mendiskusikan rencana aksi berdasarkan hasil lokakarya konsultasi kabupaten berupa 6 program antara lain program rancang ulang peruntukan lahan, program penguatan kolaborasi antar pelaku pembangunan, program pengakuan hak masyarakat adat diwilayah adat, program pemilihan komoditas ramah lingkungan, program peningkatan SDM, dan program monitoring dan evaluasi. Keenam rencana program ini mencerminkan kesepakatan para pihak atas langkah-langkah untuk mencapai skenario langkah serampak (Lampiran 6).

Aspirasi ini sepenuhnya tidak bertentangan bahkan sejalan dengan program Pemda saat ini misalnya program rancang ulang peruntukan lahan sejalan dengan kegiatan penataan ruang. Disinilah integrasi kedalam sistem perencanaan yang sudah ada diperlukan.

Saat ini terdapat mekanisme Musrenbang untuk membuat perencanaan dari kecamatan hingga nasional, namun mekanisme ini tidak cukup karena terjadi reduksi rencana dan prioritas ketika musrenbang dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Proses seperti PPA menjadi tawaran untuk memastikan dan memperkuat aspirasi para pihak dipertimbangkan dalam perencanaan. Pengalaman menjalankan proses dalam metode PPA menunjukkan kemungkinan melibatkan semua elemen para pihak, pihak-pihak dengan kepentingan berbeda bahkan bertolak belakang duduk bersama dalam satu meja untuk membicarakan visi bersama dan mencari cara untuk mencapai visi tersebut.

### **Pelajaran yang bisa dipetik**

Proses lokakarya seri pertama merupakan tahapan awal yang cukup penting karena pada tahapan ini peserta menentukan *critical variable* yang mempengaruhi sistem pembangunan di Kapuas Hulu. Variabel tersebut dikaji dan dianalisis bersama untuk menghasilkan variabel kunci yang pengaruhnya paling dominan.

Lokakarya ini berhasil mempertemukan para pihak yang beragam yaitu pengambil kebijakan, praktisi, masyarakat dan sektor swasta. Didalam forum tersebut komunikasi antar pihak mulai terbangun dimana stakeholder bisa berpendapat dan mendengarkan stakeholder lainnya tanpa saling menyalahkan.

Pada sesi awal interaksi antar para pihak belum begitu menyatu namun menjelang akhir lokakarya para pihak sudah bisa saling berkomunikasi dengan akrab. Peran aktif fasilitator untuk mendorong peserta memberikan kesempatan berbicara dan menyampaikan ide-idenya merupakan kunci untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan melalui pertukaran ide antar para pihak secara setara.

Menganalisis masalah secara bersama-sama merupakan proses penting didalam rangkaian lokakarya PPA keseluruhan. Ini hal yang baru dimana para pihak saling belajar terutama untuk pengetahuan tertentu yang hanya dikuasai oleh ahlinya. Pada awalnya terasa sulit dan lambat karena perbedaan perspektif dan pemahaman mengenai satu masalah. Walaupun prosesnya panjang, proses ini ingin memastikan para pihak duduk bersama untuk mencapai konsensus sehingga ketika kesepakatan harus diambil maka para pihak dapat menerima keputusan yang menjadi kesepakatan bersama.

Lokakarya PPA yang diikuti oleh ahli dilanjutkan dengan konsultasi public selama tiga kali yaitu tanggal 24-25 November 2011, 30 April 2012 dan 11 November 2012 merupakan rangkaian proses untuk memastikan scenario masa depan "Pembangunan Kapuas Hulu 2030" dipahami oleh para pihak selain peserta ahli di lokakarya pertama. Diskusi dengan para pihak lainnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami implikasi dari berbagai scenario dan menentukan scenario yang diinginkan terjadi dimasa depan serta menyusun langkah-langkah agar scenario terpilih tersebut tercapai.

Rencana aksi yang diturunkan dari scenario menjadi panduan untuk membuat rencana kegiatan/program yang lebih detil. Saat ini terdapat mekanisme Musrenbang untuk membuat perencanaan dari kecamatan hingga nasional, namun mekanisme ini tidak cukup karena terjadi reduksi rencana dan prioritas ketika musrenbang dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses PPA yang dikembangkan merupakan cara untuk mengintegrasikan aspirasi para pihak kedalam sistem perencanaan yang sudah ada. Pengalaman menjalankan proses dalam metode PPA menunjukkan kemungkinan melibatkan semua elemen para pihak, pihak-pihak dengan kepentingan berbeda bahkan bertolak belakang duduk bersama dalam satu meja untuk membicarakan visi bersama dan mencari cara untuk mencapai visi tersebut.

Para pihak mengapresiasi metode PPA dan pemerintahan daerah tertarik dengan metode ini sehingga mengusulkan agar proses yang sama dilakukan pada aparatur pemerintah daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyampaikan keinginannya untuk menggunakan metoda ini dan Proyek CoLUPSIA bersedia memfasilitasinya apabila ada permintaan.

## Lampiran

### 1. Daftar peserta

#### A. Lokakarya PPA seri 1

| <b>Nama</b>               | <b>Dimensi Keahlian</b>              |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Adhittia Egha P</b>    | Kepemudaan                           |
| <b>Rupinus</b>            | Pemerintahan kecamatan dan desa      |
| <b>Yohanes Entungan</b>   | Praktisi pemberdayaan desa           |
| <b>Alexander Burung</b>   | Petani                               |
| <b>Chairuddin Ambong</b>  | Praktisi usaha kelapa sawit          |
| <b>Indra Kumara</b>       | Kebijakan kehutanan                  |
| <b>Piet Sumaryoto</b>     | Kebijakan perkebunan                 |
| <b>Baco Maiwa</b>         | Pengawasan pembangunan dan legislasi |
| <b>Andi Juliansyah</b>    | Praktisi usaha perikanan             |
| <b>M Jemali</b>           | Kebijakan perikanan                  |
| <b>Luther</b>             | Hukum adat Dayak                     |
| <b>Markus Kelambu</b>     | Praktisi infrastruktur               |
| <b>H. Ade Ibrahim</b>     | Hukum adat Melayu                    |
| <b>H. Abdullah HS</b>     | Praktisi perikanan                   |
| <b>Hendra Butar Butar</b> | Kebijakan pertambangan               |
| <b>Alex Rombonang</b>     | Konservasi dan perbatasan            |

#### B. Lokakarya PPA seri 2

| <b>Nama</b>               | <b>Dimensi Keahlian</b>              |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Adhittia Egha P</b>    | Kepemudaan                           |
| <b>Rupinus</b>            | Pemerintahan kecamatan dan desa      |
| <b>Yohanes Entungan</b>   | Praktisi pemberdayaan desa           |
| <b>Indra Kumara</b>       | Kebijakan kehutanan                  |
| <b>Baco Maiwa</b>         | Pengawasan pembangunan dan legislasi |
| <b>Andi Juliansyah</b>    | Praktisi usaha perikanan             |
| <b>Ibu Rismawati</b>      | Kebijakan perikanan                  |
| <b>Luther</b>             | Hukum adat Dayak                     |
| <b>Markus Kelambu</b>     | Praktisi infrastruktur               |
| <b>H. Ade Ibrahim</b>     | Hukum adat Melayu                    |
| <b>H. Abdullah HS</b>     | Praktisi perikanan                   |
| <b>Hendra Butar Butar</b> | Kebijakan pertambangan               |
| <b>Alex Rombonang</b>     | Konservasi dan perbatasan            |
| <b>Rusvan Aswad</b>       | Tata ruang perkotaan                 |
| <b>Agus Darmanta</b>      | Kebijakan infrastruktur              |
| <b>M. Sudirman</b>        | Kebijakan Pertanian                  |



C. Lokakarya PPA seri 3

| <b>Nama</b>               | <b>Dimensi keahlian</b>              |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Rupinus</b>            | Pemerintahan kecamatan dan desa      |
| <b>Yohanes Entungan</b>   | Praktisi pemberdayaan desa           |
| <b>Indra Kumara</b>       | Kebijakan kehutanan                  |
| <b>Baco Maiwa</b>         | Pengawasan pembangunan dan legislasi |
| <b>M Jemali</b>           | Kebijakan perikanan                  |
| <b>Rismawati</b>          | Kebijakan perikanan                  |
| <b>Luther</b>             | Hukum adat dayak                     |
| <b>H. Ade Ibrahim</b>     | Hukum adat melayu                    |
| <b>H. Abdullah HS</b>     | Praktisi perikanan                   |
| <b>Hendra Butar Butar</b> | Kebijakan pertambangan               |
| <b>Rusvan Aswad</b>       | Tata ruang perkotaan                 |
| <b>Dedy, ST MT</b>        | Kebijakan infrastruktur              |
| <b>Jumanang</b>           | Kebijakan pertanian                  |

## 2. Daftar variabel dan definisi

### VARIABEL INTERNAL

| No | NAMA SINGKAT      | Variabel                         | Definisi  |
|----|-------------------|----------------------------------|---|
| 1  | <b>KOORD</b>      | Koordinasi antar sektor          | Pola kerja antara satu sektor dengan sector lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  |
| 2  | <b>POLAPIKIR</b>  | Pola pikir                       | Cara pandang dalam melihat dan menganalisis satu persoalan  |
| 3  | <b>HKADAT</b>     | Hukum adat                       | Pengakuan dan penegakan hukum bagi masyarakat adat setempat dan orang yang masuk ke wilayah adat tersebut   |
| 4  | <b>MURID</b>      | Jumlah murid                     | Jumlah anak usia sekolah yang bersekolah  |
| 5  | <b>PENDPATAN</b>  | Pendapatan masyarakat            | Penghasilan yang di peroleh dalam kurun waktu tertentu  |
| 6  | <b>KESHATAN</b>   | Tingkat kesehatan masyarakat     | Derajat kesehatan masyarakat  |
| 7  | <b>AKSEHAT</b>    | Akses Layanan Kesehatan          | Ketersediaan sarana dan petugas kesehatan dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat   |
| 8  | <b>PENDIDIKAN</b> | Tingkat pendidikan               | Rata-rata pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat  |
| 9  | <b>KOMAPEM</b>    | Kompetensi aparatur pemerintahan | Kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan   |
| 10 | <b>KEBPEMB</b>    | Kebijakan pembangunan            | Arah pembangunan yang ingin dicapai dan merupakan hasil kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan (pusat dan daerah) |
| 11 | <b>DISGURU</b>    | Sebaran guru                     | Distribusi tenaga pengajar di sekolah-sekolah   |
| 12 | <b>BDIDIK</b>     | Biaya pendidikan                 | Biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengenyam pendidikan   |
| 13 | <b>FASDIK</b>     | Fasilitas Pendidikan             | Jumlah anggaran dan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah   |
| 14 | <b>LAPKERJA</b>   | Lapangan Kerja                   | Ketersediaan peluang untuk menyerap tenaga kerja dari berbagai sector   |
| 15 | <b>KOMLULUS</b>   | Kompetensi lulusan               | Kualitas lulusan (setelah menyelesaikan pendidikan) di dunia kerja  |

|    |                    |                                |   |
|----|--------------------|--------------------------------|---|
| 16 | <b>KOMDPRD</b>     | Kompetensi anggota DPRD        | Kemampuan personal dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan                                   |
| 17 | <b>IKAN</b>        | Ketersediaan ikan              | Cadangan ikan baik di alam maupun budidaya yang tersedia  |
| 18 | <b>LISTRIK</b>     | Infrastruktur listrik          | Fasilitas kelistrikan untuk menyediakan energi listrik sampai ke masyarakat bagi kebutuhan masyarakat                     |
| 19 | <b>ARIF</b>        | Kearifan lokal pengelolaan SDA | Tata cara atau kebiasaan dalam pemanfaatan sumber daya alam dikawasan tertentu  |
| 20 | <b>ASEBUD</b>      | Pelestarian asset budaya       | Upaya menjaga dan memelihara keanekaragaman budaya lokal  |
| 21 | <b>PARTISIPASI</b> | Partisipasi masyarakat         | Keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi, serta menikmati dan memelihara hasil pembangunan |
| 22 | <b>CTAMBANG</b>    | Cadangan tambang               | Ketersediaan bahan tambang yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan  |
| 23 | <b>KEBPEMDA</b>    | Kebijakan pemda                | Aturan yang dibuat oleh eksekutif dan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan                      |
| 24 | <b>INFRAJALAN</b>  | Infrastruktur jalan            | Ketersediaan prasarana dan kondisi jalan dalam mendukung mobilitas pembangunan  |
| 25 | <b>KESLING</b>     | Kesehatan lingkungan           | Kondisi kesehatan di lingkungan kampung/desa  |
| 26 | <b>SANITASI</b>    | Sanitasi                       | Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan lingkungan (MCK, air bersih, drainase dll)                                     |
| 27 | <b>LAHANADAT</b>   | Pengelolaan lahan adat         | Pengaturan yang disepakati bersama oleh masyarakat adat tentang cara-cara pemanfaatan lahan yang dimiliki secara adat     |
| 28 | <b>TEGAKHKM</b>    | Penegakan hukum                | Penerapan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah   |
| 29 | <b>TOLERANSI</b>   | Toleransi antar agama          | Menghargai perbedaan keyakinan antar umat beragama yang diakui oleh Negara  |
| 30 | <b>PROFUSAHA</b>   | Profesionalisme pengusaha      | Kemampuan managerial yang dimiliki pengusaha  |
| 31 | <b>HAMA</b>        | Hama dan penyakit              | Intensitas (kuantitas dan frekuensi) serangan binatang, serangga dan  |

|    |                  |                                    |   |
|----|------------------|------------------------------------|---|
|    |                  |                                    | penyakit (virus, bakteri, jamur) yang mengganggu dan merusak produktifitas usaha tani                 |
| 32 | <b>LUASW</b>     | Luas Wilayah                       | Jangkauan wilayah yang dapat dikelola secara administratif  |
| 33 | <b>KEBAKARAN</b> | Kebakaran hutan                    | Intensitas kebakaran hutan baik sengaja maupun tidak sengaja  |
| 34 | <b>GUNATEKNO</b> | Penggunaan Teknologi               | tingkat kemampuan dan pemanfaatan teknologi oleh masyarakat   |
| 35 | <b>AKTEKNO</b>   | Akses teknologi                    | Tingkat kemudahan dalam mendapatkan teknologi yang tersedia   |
| 36 | <b>AKPASAR</b>   | Akses Pasar                        | Tingkat kemudahan dalam mendapatkan dan memasarkan produk termasuk menciptakan peluang pasar          |
| 37 | <b>AKINFO</b>    | Akses informasi                    | Tingkat kemudahan dalam mendapatkan informasi   |
| 38 | <b>PAD</b>       | Pendapatan Asli Daerah             | Pendapatan yang diperoleh oleh penda melalui pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatn yang sah |
| 39 | <b>ALOSAWIT</b>  | Alokasi lahan untuk sawit          | Peruntukan areal/wilayah untuk budi daya perkebunan kelapa sawit                                      |
| 40 | <b>PESTISIDA</b> | Penggunaan pestisida               | Pemakaian bahan kimia yang digunakan untuk pemberantasan hama dan penyakit tanaman                    |
| 41 | <b>MERKURI</b>   | Penggunaan merkuri                 | Tingkat penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan tanpa ijin                                     |
| 42 | <b>TATARUANG</b> | Tata ruang                         | Pembagian luas wilayah peruntukkan untuk tiap sektor pembangunan                                      |
| 43 | <b>DISTPEND</b>  | Sebaran penduduk                   | Penyebaran penduduk pada suatu wilayah  |
| 44 | <b>AKMODAL</b>   | Akses modal                        | Kemudahan dalam memperoleh dan mendapatkan modal usaha  |
| 45 | <b>KEBINVES</b>  | Kebijakan investasi                | Peraturan-peraturan yang mengatur investasi di daerah   |
| 46 | <b>HHNK</b>      | Pemanfaatan hasil hutan Bukan Kayu | Pemanfaatan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat                                      |
| 47 | <b>SISTANI</b>   | Sistem usaha tani                  | Cara yang digunakan oleh masyarakat untuk budidaya pertanian  |
| 48 | <b>DINAPOL</b>   | Dinamika politik                   | Kondisi dan keadaan perpolitikan lokal  |
| 49 | <b>KEBTRANS</b>  | Kebijakan transmigrasi             | Kebijakan untuk menempatkan transmigran ke wilayah Kapuas Hulu  |
| 50 | <b>TRAMPIL</b>   | Ketrampilan                        | Ketrampilan yang bersumber dari bakat, pengalaman dan pendidikan non formal                           |

**VARIABEL EKSTERNAL**

|   |                 |                        |  |
|---|-----------------|------------------------|--|
| 1 | <b>INTERNAS</b> | Pengaruh internasional | akibat yang ditimbulkan oleh interaksi antara masyarakat kabupaten Kapuas hulu dengan orang luar termasuk kebijakan internasional (EKSTERNAL)                                |
| 2 | <b>HUKUMNEG</b> | Hukum Negara           | Peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus ditaati seluruh warga Negara dan apabila melanggarnya akan mendapatkn sanksi/hukuman (EKSTERNAL) |
| 3 | <b>JMPEND</b>   | Jumlah penduduk        | Jumlah jiwa yang mendiami/menetap di suatu wilayah   |
| 4 | <b>BANJIR</b>   | Banjir                 | Intensitas (kuantitas dan frekuensi) banjir di suatu wilayah   |
| 5 | <b>DEBIT</b>    | Debit air              | Kondisi volume air di sungai dan danau   |
| 6 | <b>SEDIMEN</b>  | Sedimentasi            | Kondisi penumpukan material di dasar sungai dan danau  |

### 3. Rangking variabel berdasarkan pengaruh (langsung, tidak langsung dan total)

|    | Kekuatan langsung terbobot |             |
|----|----------------------------|-------------|
| 1  | KEBPEMDA                   | 5,396541868 |
| 2  | GUNATEKNO                  | 4,750753819 |
| 3  | POLAPIKIR                  | 3,285483005 |
| 4  | TRAMPIL                    | 2,456586376 |
| 5  | PENDIDIKAN                 | 2,375376909 |
| 6  | ARIF                       | 2,230214987 |
| 7  | PARTISIPASI                | 2,000317397 |
| 8  | KOORD                      | 1,900301528 |
| 9  | KEBTRANS                   | 1,878566053 |
| 10 | HKADAT                     | 1,781532682 |
| 11 | INFRAJALAN                 | 1,727546843 |
| 12 | DISTPEND                   | 1,689156913 |
| 13 | PROFUSAHA                  | 1,407630761 |
| 14 | ALOSAWIT                   | 1,187688455 |
| 15 | KEBINVES                   | 1,125178536 |
| 16 | AKINFO                     | 1,077717302 |
| 17 | AKMODAL                    | 0,923757687 |
| 18 | HAMA                       | 0,824783649 |
| 19 | TATARUANG                  | 0,760741625 |
| 20 | KEBAKARAN                  | 0,703815381 |
| 21 | KOMAPEM                    | 0,659826919 |
| 22 | AKPASAR                    | 0,659826919 |
| 23 | PESTISIDA                  | 0,659826919 |
| 24 | DINAPOL                    | 0,659826919 |
| 25 | KOMDPRD                    | 0,603270326 |
| 26 | AKTEKNO                    | 0,527861535 |
| 27 | KEBPEMB                    | 0,517304305 |
| 28 | CTAMBANG                   | 0,475075382 |
| 29 | LUASW                      | 0,475075382 |
| 30 | TEGAKHKM                   | 0,469210254 |

| Kekuatan tak langsung terbobot |             |
|--------------------------------|-------------|
| ARIF                           | 2,36677243  |
| KOMDPRD                        | 2,212034481 |
| GUNATEKNO                      | 2,091280119 |
| PARTISIPASI                    | 2,066407493 |
| HKADAT                         | 2,050870594 |
| POLAPIKIR                      | 1,988917212 |
| KEBPEMDA                       | 1,940407036 |
| TRAMPIL                        | 1,85655367  |
| DISTPEND                       | 1,82812767  |
| PENDIDIKAN                     | 1,807014083 |
| AKINFO                         | 1,701840865 |
| KOORD                          | 1,669994627 |
| PROFUSAHA                      | 1,561159507 |
| KEBAKARAN                      | 1,561159507 |
| KOMAPEM                        | 1,495208483 |
| AKTEKNO                        | 1,495208483 |
| DINAPOL                        | 1,445428113 |
| TATARUANG                      | 1,39574032  |
| CTAMBANG                       | 1,367994465 |
| LUASW                          | 1,361653301 |
| KEBINVES                       | 1,301294514 |
| KEBPEMB                        | 1,277790434 |
| TEGAKHKM                       | 1,183075819 |
| AKMODAL                        | 1,126583677 |
| ALOSAWIT                       | 1,112460641 |
| KEBTRANS                       | 1,046362548 |
| LISTRIK                        | 0,913651757 |
| INFRAJALAN                     | 0,913651757 |
| KOMLULUS                       | 0,664537103 |
| PENDPATAN                      | 0,616817307 |

| Kekuatan total terbobot |             |
|-------------------------|-------------|
| KEBPEMDA                | 2,647688263 |
| GUNATEKNO               | 2,63750391  |
| ARIF                    | 2,353505275 |
| POLAPIKIR               | 2,263955645 |
| PARTISIPASI             | 2,06854524  |
| HKADAT                  | 2,011721456 |
| TRAMPIL                 | 1,969867499 |
| PENDIDIKAN              | 1,923682472 |
| KOMDPRD                 | 1,89167143  |
| DISTPEND                | 1,808215337 |
| KOORD                   | 1,729105916 |
| AKINFO                  | 1,588317457 |
| PROFUSAHA               | 1,541819463 |
| KEBAKARAN               | 1,399515804 |
| KOMAPEM                 | 1,333465482 |
| AKTEKNO                 | 1,30750293  |
| DINAPOL                 | 1,288443121 |
| KEBINVES                | 1,271401409 |
| TATARUANG               | 1,259992869 |
| KEBTRANS                | 1,212306909 |
| CTAMBANG                | 1,19770593  |
| LUASW                   | 1,192486839 |
| ALOSAWIT                | 1,135578624 |
| AKMODAL                 | 1,094033064 |
| INFRAJALAN              | 1,080851943 |
| KEBPEMB                 | 1,076243909 |
| TEGAKHKM                | 1,043715167 |
| LISTRIK                 | 0,769694165 |
| PENDPATAN               | 0,572130634 |
| KOMLULUS                | 0,533674665 |

#### **4. Narasi lengkap Skenario**

##### **Skenario 1. Langkah Serampak**

Skenario ini menggambarkan pembangunan yang berkelanjutan yang ditandai dengan adanya keseimbangan antara kepentingan budidaya dan kepentingan perlindungan lingkungan. Kebijakan yang dihasilkan merupakan kesepakatan para pihak secara bersama-sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya. Penyusunan ini pada gilirannya meningkatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemda senantiasa mendukung dan berpihak pada mereka.

Diantara kebijakan yang penting dan mempengaruhi masa depan Kapuas hulu adalah pendidikan yang merupakan motor penggerak perubahan dan kemajuan. Pada skenario ini kebijakan pemda yang berkaitan dengan pendidikan dicapai melalui kemudahan akses pendidikan dalam bentuk infrastruktur (gedung sekolah, akses transportasi dsb) maupun dari sisi anggaran sehingga tidak ada alasan kekurangan biaya. Biaya pendidikan murah dan dalam jangka panjang anak sekolah tidak perlu lagi membayar biaya apapun. Jika selama ini ada anggapan berada dikawasan perbatasan, pendidikan di negara tetangga terlihat lebih murah dan maju maka didalam skenario ini sektor pendidikan di Kapuas Hulu sudah menyamai bahkan mengungguli pendidikan dari negara tetangga.

Dalam jangka panjang, peningkatan sektor pendidikan menyumbang kepada peningkatan wawasan dan pola pikir masyarakat. Pengetahuan masyarakat semakin meningkat dan dengan mudah memahami dan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang. Teknologi tepat guna salah satunya diaplikasikan pada konteks masyarakat Kapuas Hulu yang masih berada di pedesaan dan secara umum pemanfaatan teknologi mengarah pada teknologi ramah lingkungan misalnya kebutuhan energi dipenuhi melalui pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan memanfaatkan potensi alam setempat.

Keberadaan adat di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan karakteristik yang penting mengingat keragaman suku yang tinggal di kabupaten ini. Mereka menggunakan dan menegakkan aturan adat sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di masing-masing masyarakat adat. Dalam konteks yang lebih luas, secara formal terdapat hukum nasional yang merupakan payung bagi tata aturan berbangsa. Pada skenario ini, aturan adat dan hukum nasional tidak saling bertentangan, bahkan aturan adat mendukung penegakan aturan yang diatur oleh hukum formal. Ini disebabkan hukum adat tidak hanya diakui sebagai sumber hukum namun diterapkan oleh masyarakat adat.

Pada skenario ini, pengembangan sektor-sektor yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak mempertimbangkan tata ruang yang disepakati bersama antara pihak-pihak berkepentingan. Tata ruang juga disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan dan kepentingan lahan untuk produksi maupun budidaya.

## **Skenario 2. Lempar Koin sembunyi Tangan**

Skenario ini menggambarkan kebijakan pembangunan lebih berpihak kepentingan pribadi maupun kelompok. Ini tercermin dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang dikeluarkan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur terutama akses transportasi kondisinya buruk sehingga memperlambat mobilisasi dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Dampak dari sikap ini, sektor pendidikan pun kurang mendapatkan perhatian sehingga dalam jangka panjang ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di semua sektor. Terjadi inefisiensi karena produktivitas tenaga kerja rendah ditambah dengan rendahnya nilai tambah produk karena hasil produk seperti pertanian, perikanan dan perkebunan mayoritas dipasarkan dalam bentuk mentahnya. Ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi.

Dalam jangka panjang, teknologi semakin berkembang namun tidak bisa diikuti oleh pemahaman dan penguasaan oleh masyarakat. Teknologi hijau (green technology) sudah jauh berkembang namun sistem produksi masyarakat masih menggunakan teknologi yang masih kuno dan tidak ramah lingkungan.

Dari sisi kelembagaan sosial, skenario ini menggambarkan kondisi dimana hukum nasional semakin kuat dalam penerapan maupun penegakan. Sedangkan aturan adat mulai ditinggalkan karena masyarakat menganggap hal tersebut sudah usang. Pada akhirnya kelembagaan adat seperti pemuka adat, aturan-aturan yang mengatur perkehidupan tidak dianggap lagi. Kalau dulu pemuka adat ibarat harimau, maka pada skenario ini mereka sudah tidak punya gigi lagi.

Nilai-nilai sosial diantaranya hal-hal yang dahulu biasanya dikerjakan secara bergotong-royong mulai ditinggalkan. Nilai-nilai sosial yang dahulu mempererat masyarakat semakin tidak diperdulikan lagi. Masyarakat cenderung mau menang sendiri apalagi dengan kegiatan pembangunan yang bersifat proyek, partisipasi masyarakat hanya mengharapkan imbalan belaka.

Tata ruang yang sudah ditetapkan hanya menjadi dokumen tanpa ada implementasi maupun penerapan. Pengambil kebijakan tidak peduli dengan tata ruang sehingga arahan pemanfaatan lahan mengikuti kemauan investor atau keinginan kelompok-kelompok tertentu. Pada tingkat masyarakat, sikap tidak peduli terlihat dari maraknya eksploitasi sumber daya alam dan mineral tanpa memperhatikan lingkungan. Misalnya penebangan kayu dan penambangan emas secara masif menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan rusaknya bentang alam.

Dalam jangka panjang kerusakan lingkungan semakin parah, sedimentasi sungai menyebabkan air tidak bisa diminum dan ketika musim hujan terjadi banjir. Dampak ekonomi dari bencana ini sangat terasa karena menurunkan produktivitas serta biaya tinggi seperti penyediaan dana bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana, biaya perbaikan konstruksi dan lain sebagainya.

Di sisi pemerintah daerah, pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi dan investasi di Kapuas Hulu semakin tergerus karena sebagian kerusakan akibat bencana lingkungan tersebut harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Bahkan, untuk mengembalikan kondisi ekosistem agar berfungsi seperti semula, biaya yang diperlukan melampaui kemampuan keuangan pemerintah daerah.



### **Skenario 3. Mendulang Emas mendapat Batu**

Skenario ini menggambarkan kebijakan yang memihak kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan adanya ketidakmerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan diarahkan kepada daerah-daerah tertentu saja, sementara daerah-daerah terpencil cenderung diabaikan.

Tidak hanya itu, akses pendidikan dalam skenario ini digambarkan semakin sulit terutama untuk masyarakat kebanyakan. Biaya pendidikan semakin tinggi akibat akses transportasi masih buruk dan lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diserahkan sepenuhnya dan dikelola oleh pihak swasta. Tidak mengherankan jika yang bisa menempuh pendidikan adalah mereka yang didukung oleh kemampuan finansial yang memadai.

Lemahnya akses pendidikan berimbas kepada penguasaan informasi dan lemahnya kemampuan masyarakat. Pada saat yang sama informasi dan teknologi semakin cepat berkembang, tetapi masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak menguasainya. Jangankan memanfaatkan untuk usaha produksi, seringkali teknologi yang masuk menjadikan ketergantungan karena hanya menjadi barang konsumsi yang tidak menghasilkan nilai produksi.

Kondisi ini diperparah dengan kelembagaan sosial masyarakat yang semakin lemah. Aturan dan hukum adat perlahan-lahan ditinggalkan dimana aturan-aturan yang ada mengacu kepada hukum nasional.

Tatanan adat yang sebelumnya tata cara kehidupan masyarakat baik itu produksi maupun religi akhirnya menghilang. Pola produksi masyarakat antara lain berkaitan dengan hak-hak masyarakat sebelumnya diatur berdasarkan adat setempat mulai terganggu. Muncul ketidakjelasan terhadap hak-hak masyarakat berkaitan dengan penguasaan maupun kepemilikan. Disisi lain sistem hukum nasional mensyaratkan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat.

Ketidakjelasan penguasaan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat menyebabkan konflik di beberapa wilayah. Konflik ini tidak hanya didasari oleh ketidakjelasan pengakuan hak masyarakat tetapi juga dipengaruhi oleh terjadinya ketimpangan pembangunan di semua sektor.

Adanya ketidakjelasan ini juga mendorong sikap egois dalam penggunaan lahan. Masyarakat berlomba-lomba membuka lahan tanpa memperdulikan perlunya wilayah-wilayah tertentu dilindungi. Pembukaan yang masif pada akhirnya menyebabkan konflik antar masyarakat karena muncul ketimpangan penguasaan lahan, ada yang punya lahan banyak dan ada yang tidak punya sama sekali.

Jalannya pembangunan pun agak tersendat akibat seringnya terjadinya konflik baik konflik antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah maupun masyarakat dengan pihak swasta. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga semakin tinggi untuk mengatasi konflik yang ada.

#### **Skenario 4. Makan Tuba Buah**

Skenario ini menggambarkan pembangunan di Kapuas Hulu berjalan ditempat, apabila diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan. Kebijakan dibuat sesuai dengan keinginan penguasa dan sering berganti-ganti seiring dengan pergantian penguasa. Intervensi pembangunan hanya dilakukan untuk memuaskan kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat.

Sektor pendidikan makin terpuruk, ditambah dengan adanya masalah dalam pemenuhan akses pendidikan seperti infrastruktur dan pembiayaan. Masyarakat kebanyakan dengan tingkat ekonomi rendah, semakin sulit mengakses pendidikan. Kemiskinan dipadukan dengan kurangnya lapangan kerja membuat semakin sulitnya masyarakat mengakses pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan berdampak kepada lemahnya kualitas SDM dalam mengolah informasi dan kapasitas untuk mengembangkan diri. Produktivitas secara umum lemah berdampak pada situasi ekonomi yang berjalan lambat. Pada saat yang sama, masyarakat tidak dapat memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang.

Pada skenario ini masyarakat adat masih memegang hukum adat dan pemerintah daerah mengakui keberadaan masyarakat dan hukum adat. Dalam kenyataannya masih ditemui masyarakat yang menggunakan kearifan lokal dalam sistem produksi mereka.

Namun pengakuan ini sifatnya semu karena hanya sebagai pencitraan karena Kapuas Hulu sering mendapat sorotan dari masyarakat nasional maupun internasional. Ada kontradiksi antara kebijakan di tingkat atas dan penerapannya. Di masyarakat berkembang sikap mengkomersialisasikan hukum adat demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok.

Masyarakat kurang terlibat dalam proyek pembangunan pemerintah daerah dan hanya menjadi penonton saja. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilakukan oleh aparat pemerintahan tanpa mendengarkan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat. Sebagai akibatnya tingkat kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan rendah. Pemerintah tidak menyadari bahwa masyarakat mempunyai peran yang sama dan apabila kekuatan mereka digabung akan menghasilkan sebuah kekuatan yang lebih besar.

Kebijakan tata ruang yang mengatur alokasi pengembangan ruang sesuai kepentingan produksi maupun lindung dari semua stakeholder, menjadi senjata pemerintah daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mengaturnya sesuai dengan "pesanan" pihak-pihak tertentu.

Salah kelola merupakan keniscayaan yang merupakan hasil dari kebijakan pembangunan yang tidak fokus. Dampak jangka panjang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat.

### 5. Matrik skenario terpilih hasil konsultasi public kecamatan

| Skenario terpilih | Alasan yang diinginkan terjadi  | Alasan yang ditakutkan terjadi   | Usulan tindakan untuk mendorong dampak positif/mengurangi dampak negatif   | Pihak yang dilibatkan  |
|-------------------|---|--|--|--|
| Langkah serampak  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten kapuas hulu sedang dalam masa membangun, oleh sebab itu harapan sebagai masyarakat kabupaten Kapuas Hulu benar-benar menjadi panutan bagi kabupaten lainnya pada tahun 2030</li> <li>• Mencerminkan semangat untuk kerjasama yang baik diantara berbagai pihak</li> <li>• Hasil pembangunan lebih bisa dipertanggungjawabkan dan arah kebijakan dapat terukur</li> <li>• Dapat menentukan kebijakan pembangunan dalam jangka pendek, menengah dan panjang</li> <li>• Adanya keterlibatan masyarakat (partisipatif) dari proses perencanaan sampai pengawasan</li> <li>• Peluang lebih besar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan</li> <li>• Meningkatkan pola pikir masyarakat sehingga mampu merencanakan lebih baik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan ekonomi dan jalannya pembangunannya agak sedikit melambat</li> <li>• Proses yang memakan waktu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat</li> <li>• Membangun komunikasi, koordinasi yang terus menerus serta sosialisasi terhadap masyarakat</li> <li>• Mendorong dukungan jangka pendek dan menengah untuk pertumbuhan ekonomi (misalnya kompensasi)</li> <li>•</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tokoh pemuda</li> <li>• Tokoh adat</li> <li>• Masyarakat desa</li> <li>• Pemdes</li> <li>• Pemuka agama</li> <li>• Lembaga keuangan</li> <li>• pebisnis</li> <li>• muspika kecamatan</li> <li>• instansi vertikal</li> <li>• DPR</li> <li>• SKPD</li> <li>• LSM dan Pers</li> </ul> |

|                 |   |  |   |  |
|-----------------|---|--|---|--|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan kondisi kondusif maka pembangunan mudah diwujudkan</li> </ul> |  |   |  |
| Makan tuba buah |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mementingkan diri sendiri/kelompok atau golongan</li> <li>• Kurangnya perhatian terhadap sektor pendidikan serta penguasaan teknologi</li> <li>• Masyarakat adat dan hukum adat diakui tetapi tidak diperhatikan keberadaannya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus ada kerjasama yang solid dengan berbagai pihak</li> <li>• Harus ada komunikasi yang erat dengan instansi/dinas yang terkait, sehingga dapat terakomodasi apa yang menjadi persoalan/permasalahan yang terjadi</li> <li>• Pentingnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar dapat mematuhi hukum adat/hukum nasional yang berlaku di negara kita</li> <li>• Melakukan diskusi, seminar, lokakarya dan musrenbang bersama masyarakat dan instansi terkait</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat</li> <li>• Pemda</li> <li>• Penegak hukum adat</li> <li>• Penegak hukum nasional</li> <li>• Dinas pendidikan</li> <li>• Kepala daerah</li> <li>• DPRD</li> </ul> |

## 6. Hasil pengembangan rencana aksi

### RENCANA TINDAK LANJUT PPA KAPUAS HULU (hasil diskusi dalam lokakarya kemajuan CoLUPSIA 2012)

#### 1. Program Rancang ulang peruntukan lahan

| Tindakan  | Siapa yang melakukan   | Kapan akan dilakukan   |
|---|--|--|
| Melakukan koordinasi dan pemantapan serta kesiapan untuk melakukan pemetaan ulang terhadap peruntukan lahan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah, masyarakat, pengusaha dan NGO</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimulai sejak sekarang</li> </ul> |
| Harus mengumpulkan aspirasi dari masyarakat mulai dari wilayah kawasan sampai administratif, tepat dan akurat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolaboratif masyarakat dan pemerintah</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangka pendek</li> </ul>          |
| Menfasilitasi/mediasi antara masyarakat dengan pihak lain   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda</li> <li>• Investor</li> <li>• Camat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                        |

#### 2. Penguatan kolaborasi antar komponen pelaku pembangunan (pemda, masyarakat, swasta)

| Tindakan  | Siapa yang melakukan  | Kapan akan dilakukan   |
|---|---|--|
| Dengan membuat kesepakatan bersama antara pihak terkait dan masyarakat dengan cara menggelar pertemuan untuk menghasilkan kesepakatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda, DPRD, masyarakat dan pengusaha</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimulai sejak sekarang</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda</li> <li>• DPR</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• Pengusaha</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                        |
| Memperhitungkan social cost dalam perencanaan pembangunan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                        |

#### 3. Pengakuan hak masyarakat adat di wilayah adat

| <b>Tindakan</b>  | <b>Siapa yang melakukan</b>  | <b>Kapan akan dilakukan</b>  |
|--|--|--|
| Buat tim terpadu melibatkan pemerintah dan masyarakat setempat | <ul style="list-style-type: none"> <li>• tim teknis yang melibatkan masyarakat setempat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• satu tahun anggaran berjalan</li> </ul> |
| Memperhitungkan social cost dalam perencanaan pembangunan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                              |

#### 4. Pemilihan komoditas yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat

| <b>Tindakan</b>   | <b>Siapa yang melakukan</b>   | <b>Kapan akan dilakukan</b>   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensifikasi perkebunan karet dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan dan pemeliharaan yang benar</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat (poktan)</li> <li>• Pemda (disbunhut)</li> <li>• Swasta</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan teknologi tepat guna (pengembangan PLTMH, pengolahan air bersih, pemanfaatan sumber air untuk perikanan dan pertanian)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas pertambangan dan energi</li> <li>• Dinas cipta karya</li> <li>• Dinas perikanan</li> <li>• Dinas pertanian</li> <li>• Masyarakat</li> <li>• BUMD (swasta)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                             |
| Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dengan tetap berazaskan kelestarian lingkungan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas kehutanan (pemda) dan kementerian kehutanan (BTNBK, BTNDS)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaannya setiap tahun</li> </ul> |
| Energi ramah lingkungan (air terjun, gas dan angin)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas pertambangan dan energi</li> <li>• Bappeda</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>                             |

#### Catatan:

- Pemilihan komoditas ramah lingkungan: siapa yang menentukan?
- perkebunan rakyat harus ada karena memungkinkan masyarakat menjadi investor

#### 5. Peningkatan SDM

| <b>Tindakan</b>            | <b>Siapa yang melakukan</b>  | <b>Kapan akan dilakukan</b>                              |
|----------------------------|--|--|
| Pemerataan tenaga pendidik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas pendidikan pusat dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013</li> </ul> |

|   |   |        |
|---|---|--------|
| sesuai kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan guru di daerah terpencil | daerah                                    |        |
| Pendirian universitas di kapuas hulu                                    | • Dinas pendidikan, pemda, DPRD, pusat    | • 2013 |
| Diklat aparatur pemerintah  | • Pemda, Mendikbud, Pusat                 | •      |
| Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan                      | • Pemerintah pusat<br>• Pemerintah daerah | •      |
| Pemerataan dana BOS   | • Pusat, daerah                           | •      |
| Beasiswa untuk yang berprestasi   | • Pusat, daerah                           | •      |
| - Kursus komputer<br>- Penggunaan GPS<br>- Pembuatan peta               | • Pemda<br>• LSM                          | •      |

Catatan:

- a. Pendirian universitas urgen karena di daerah perbatasan
- b. Kenapa tidak politeknik lebih dulu? Siapa yang bayar?

#### 6. Monitoring dan Evaluasi

| <b>Tindakan</b>  | <b>Siapa yang melakukan</b>  | <b>Kapan akan dilakukan</b> |
|--|--|-----------------------------|
| Dalam pelaksanaannya instansi terkait harus melibatkan masyarakat setempat sehingga penilaian mutu penilaian lebih baik    | • Instansi terkait dan masyarakat  | • Setiap kegiatan proyek    |
| Sering dilakukan FGD untuk mengetahui isu terkini mulai daerah sampai pusat agar diperoleh kebijakan yang tepat dan akurat | • Kolaboratif (masyarakat, pemerintah dan stakeholder) dengan pemerintah sebagai fasilitator | • Diadakan setiap tahun     |